



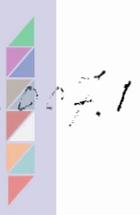
Hidup adalah perjuangan
Orang yang berani hidup, haruslah berani berjuang
Sedangkan dalam berjuang, seyogyanya
menerima kesuksesan dengan bersyukur dan
menerima kegagalan dengan tawakal
Karena hasil perjuangan, adalah sukses atau gagal

@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati
kupersembahkan karya sederhana ini
kepada Ayah, Ibu yang selalu
membimbing dan mendo'akan ke-
berhasilan putra-putrinya, ju-
ga kepada adik-adikku tercinta
Lena, Dayan, Milda, Sandi dan
si bungsu Adi, serta mas Edi
tercinta sebagai ungkapan rasa
cinta dan kasih.
Terima kasih buat segalanya.

A/SEP/1987/1001



PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU) DALAM PROGRAM PEMBINAAN PETANI SAPI PERAH

(Studi kasus di wilayah kerja balai penyuluhan pertanian Cisarua kecamatan Cisarua kabupaten Bogor Jawa Barat)

Oleh :
NOY MUIKAYANTI



**JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
B O G O R
1987**

Cipta Dilindungi Undang-undang
1. dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RI NGKASAN

NOY MUIKAYANTI. 1987. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dengan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) Dalam Program Pembinaan Petani Sapi Perah (Studi kasus di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, dibawah bimbingan Bambang S. Utomo)

Pembangunan di sub sektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini perkembangan peternakan sapi perah terlihat semakin mendapat perhatian pemerintah. Khusus dalam rangka swasembada susu telah lama pemerintah mengusahakan pencapaian kebutuhan dalam negeri tersebut. Salah satu usaha merintis ke arah itu adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan pertanian (dalam hal ini di sub sektor peternakan sapi perah) dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani sapi perah.

Tujuan dari praktek lapang ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan melalui sistem kerja LAKU beserta aspek-aspeknya dalam program pembinaan petani sapi perah. Aspek-aspek tersebut ialah menyangkut koordinasi penyuluhan pertanian, penyusunan program dan sebagainya.

Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan sistem kerja LAKU dan keikutsertaan petani dalam rangka program pembinaan dan pengembangan usaha sapi perah dilakukan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hikmah Ciprianti - IPB University

IPB University

penelaahan terhadap dua kelompok tani sapi perah yang ada di WKBPP Cisarua. Responden terdiri dari PPL (tujuh) orang dan petani (30) orang. Pengolahan data secara prosentase dan tabulasi kemudian dianalisa secara deskriptif.

Sejalan dengan mulai digalakkannya pembangunan pertanian terpadu dan polivalensi aparat penyuluhan pertanian, maka di wilayah kabupaten dati II Bogor koordinasi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh FKPP II yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh TIM KERJA TEKNIS FKPP II. Dengan adanya FKPP II ini membawa pengaruh yang baik terhadap semakin mantapnya landasan dan ruang gerak penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat WKBPP khususnya dalam penyusunan program dan penyelenggaraan latihan PPL di BPP.

Dalam program pembinaan bagi petani sapi perah ternyata di WKBPP Cisarua koordinasi yang dilaksanakan baru terbatas sampai tingkat WKBPP. Di tingkat WKPP upaya koordinasi masih sulit diwujudkan. Para petugas masih bertitik tumpu pada tugas dari dinas yang menjadi induknya. Keadaan ini sering menimbulkan overlapping di dalam penyelenggaraan kegiatan. Hambatan yang ada bersifat struktural yang menyangkut wewenang dan tugas dinas yang diatur pemerintah pusat. Hal-hal tersebut menyulitkan usaha integrasi antar dinas dalam lingkup departemen pertanian di tingkat lapangan (WKPP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilang mengutip, bagai atau seluruh atau in ini kea merantur dan menyebarkan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Dalam penyusunan program di BPP Cisarua ternyata langkah-langkahnya telah sesuai dengan petunjuk dari BPLPP yang mana terdiri dari enam langkah dan telah melibatkan pihak luar BPP dari berbagai instansi/lembaga. Akan tetapi pada langkah musyawarah dan penarikan input, pihak-pihak tersebut hanya terlibat secara fisik saja. Hal demikian menunjukkan bahwa program di BPP Cisarua belum mencerminkan bertemunya kepentingan bersama. Menurut PPL dan sumber informasi informal dari petugas dalam BPP, hal ini berpengaruh terhadap kurang mantapnya pihak dinas/instansi lain dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian yang disusun. Masing-masing pihak berinduk pada tugas dari dinas/instansi tempat bekerja.

Dalam pelaksanaan sistem kerja LAKU di WKBPP Cisarua pada subsistem latihan metoda yang sering digunakan dalam penyampaian materi adalah ceramah, diskusi dan praktek di kelas dalam arti penggunaan alat peraga yang digunakan dalam kelas/ruangan. Akan tetapi tidak setiap latihan menggunakan alat peraga. Alat peraga ini penggunaannya hanya terbatas untuk sekedar ditunjukkan pada peserta latihan. Jadi praktis materi yang diberikan lebih banyak bersifat teoritis. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan pernyataan 86 persen responden bahwa penyampaian materi latihan terutama pada tanaman pangan. Dalam subsistem kunjungan



menunjukkan bahwa maksimal baru 56 persen dari target kunjungan yang dapat dipenuhi. Sedangkan supervisi yang dilakukan PPM-BPP ternyata belum dapat dilaksanakan secara teratur.

Dalam pembinaan bagi petani sapi perah jika ditinjau dari tempat kunjungan, frekwensi kunjungan, metoda dan materi kunjungan ternyata rata-rata petani responden menyatakan kurang sesuai. Akibatnya interaksi antara PPL dan petani sangat rendah. Namun demikian ternyata dua kelompok tani sapi perah yang ditelaah sudah dapat dikatakan maju. Hal ini dinilai dari dinamika kelompok itu yang cukup baik. Semua ini dimungkinkan oleh karena peranan kontak tani yang sangat besar dalam mengusahakan kemajuan kelompoknya. Akan tetapi apabila kedua kelompok tani tersebut diperbandingkan (Baru Tegal dan Paragajen) ternyata kelompok tani Baru Tegal lebih maju dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen, hal ini diakibatkan pada perbedaan dalam aktifitas kontak tani, pengambilan keputusan bersama dan lain-lain.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM KERJA
LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU) DALAM PROGRAM PEMBINAAN
PETANI SAPI PERAH

(Studi Kasus Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian
Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa
Barat)

oleh

NOY MUIKAYANTI

A 201315

Laporan Praktek Lapang

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Pertanian

pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

B O G O R

1 9 8 7



PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTEK
LAPANG INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG
BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGU-
RUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN

Bogor, Desember 1987



Noy Muikayanti

A. 201315

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Judul Laporan PL : PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DENGAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN
KUNJUNGAN (LAKU) DALAM PROGRAM
PEMBINAAN PETANI SAPI PERAH

Nama Mahasiswa : NOY MUIKAYANTI
Nrp. : A 201315

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

 2/12-87

(Ir. Bambang S. Utomo, MDS)

Nip; 130 516 354

Mengetahui

Ketua



Jurusan Ilmu-ilmu Sosial

Ekonomi Pertanian



(Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira)

Nip; 130 345 014

Tanggal Lulus : 2 Desember 1987

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 6 Januari 1965 dari Ayah Drs. H. Eddy Kosasih dan Ibu Iis Rochayati sebagai anak pertama dari enam bersaudara.

Penulis lulus SD tahun 1976, dan lulus dari SMP tahun 1980, keduanya di Jakarta. Pada tahun 1983 lulus dari SMA Negeri 13 Jakarta. Melalui Proyek Perintis I diterima di IPB, dan pada tahun 1984 mengambil bidang keahlian Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun ajaran periode 1985/1986 penulis diangkat menjadi asisten luar biasa mata kuliah Sosiologi Pedesaan.

- Hak cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan perbuatan lainnya yang merugikan hak cipta dan hak kejiwaan penulis tanpa seijin dan tanpa membayar royalti kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) dan/atau penerbitnya.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi petunjuk dan rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praktek lapang dan laporan ini.

Laporan ini merupakan hasil pengamatan di lapangan mengenai pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) dalam program pembinaan petani sapi perah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. Bambang S. Utomo, MDS yang telah membimbing selama praktek lapang dan pembuatan laporannya.

Kepada Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritiknya. Laporan ini merupakan bukti kasih orang tua dan dorongan dari seorang yang penulis kasihi.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian semoga hasil yang dituangkan dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi mereka yang memerlukan.

Bogor, Desember 1987

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Ruang Lingkup Permasalahan	3
Identifikasi Masalah	3
Tujuan dan Kegunaan Praktek Lapang ..	4
Kerangka Pemikiran	5
Metodologi Praktek Lapang	10
KEADAAN DAN POTENSI DAERAH PRAKTEK LAPANG	12
PENGORGANISASIAN PENYULUHAN DAN OPERASIONAL SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN DI KABUPATEN BOGOR	14
Koordinasi Penyuluhan Pertanian	14
Operasional Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan	15
Organisasi dan Tata Kerja Penyuluhan Pada Di- nas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor	17
PROGRAM PENYULUHAN DI BPP CISARUA	19
Pelaksanaan Penyusunan Program Penyuluhan Di BPP Cisarua	19
Rencana Kerja PPL	22
Program Penyuluhan Bagi Petani Sapi Perah	25
PELAKSANAAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN DI WKBPP CISARUA	32
Identitas PPL Responden	32
Latihan Di BPP	34
Kunjungan PPL	41

Hak cipta milik IPB University
 Tidak diperjualbelikan
 Dilarang mengutip, mengundangi, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari IPB University
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IPB University.



	Halaman
Supervisi Kunjungan PPL	44
Pembinaan Kelompok Tani Sapi Perah Di WKBPP Cisarua	46
KERAGAMAN KELOMPOK TANI SAPI PERAH	50
Identitas Petani Responden	52
Kelompok Tani Sapi Perah	57
KESIMPULAN DAN SARAN	75
Kesimpulan	75
Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Masalah Dalam Usaha Peternakan Sapi Perah Di WKBPP Cisarua (1987)	27
2.	Cara Mencapai Tujuan Program Penyuluhan Usaha Peternakan Sapi Perah Di WKBPP Cisarua (1987)	30
3.	Tanggapan Petani Responden Terhadap Waktu dan Tempat Kunjungan PPL (1987)	46
4.	Tanggapan Petani Responden Terhadap Frekwensi Kunjungan PPL (1987)	47
5.	Tanggapan Petani Responden Terhadap Materi dan Metoda Penyuluhan Yang Digunakan PPL (1987)	48
6.	Identitas Petani Responden Kelompok Tani Baru Tegal Berdasarkan Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian (1987)	53
7.	Identitas Petani Responden Kelompok Tani Paragajen Berdasarkan Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian (1987)	54
8.	Dorongan Petani Mengikuti Kelompok Tani Sapi Perah (1987)	61
9.	Pihak Yang Menentukan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Kelompok (1987) ...	63
10.	Penyampaian Pesan-pesan Atau Informasi Pertanian Di Dalam Kelompok (1987)	65
11.	Kegiatan Petani Dalam Mencari Informasi Tentang Pengelolaan Usaha Peternakan Sapi Perah Menurut Sumbernya (1987)	68
12.	Kepuasan Atas Kegiatan Kelompok (1987)	71
13.	Perbandingan Ciri-ciri Kelompok Tani Baru Tegal dan Kelompok Tani Paragajen (1987)	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran

1.	Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua (1987)	83
2.	Topografi Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua (1987)	84
3.	Curah Hujan Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua (1987)	85
4.	Genis Tanah Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua (1987)	86
5.	Hubungan Programa FKPP II Dengan Programa BPP (1987)	93
6.	Tingkat Keterlibatan Peserta Penyusunan Program Penyuluhan Di BPP Cisarua (1987)	99
7.	Identifikasi PPL Responden Berdasarkan Hubungan Antara Kelompok Umur, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pendidikan (1987)	105
8.	Penggunaan Metoda Penyampaian Materi Dalam Latihan PPL Di BPP (1987)	105
9.	Bobot dan Titik Berat Materi Latihan Yang Diterima PPL Di WKBPP Cisarua (1987)	106
10.	Relevansi Materi Latihan Dengan Kebutuhan Lapangan PPL (1987)	106
11.	Manfaat Latihan Bagi PPL Di BPP Cisarua (1987)	107
12.	Jumlah Kelompok Tani Yang Berhasil Dikunjungi Oleh PPL Pada Setiap Periode Kunjungan (1987)	107
13.	Tanggapan PPL Tentang Supervisi (1987)	107
14.	Keadaan Tanggungan Keluarga Responden (1987)	108

Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR GAMBAR

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
	<u>Lampiran</u>	
1.	Proses Rencana Pembaharuan	7
1.	Koordinasi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia	87
2.	Susunan Organisasi FKPP II Kabupaten Bogor Jawa Barat	88
3.	Susunan Organisasi TLM KERJA TEKNIS FKPP II Kabupaten Bogor Jawa Barat	90
4.	Susunan Organisasi FKPP-WKBPP Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ..	92
5.	Pola Operasional Sistem Kerja LAKU Yang Dikem- bangkan Di Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat	94
6.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyuluhan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat	95
7.	Kesesuaian Pola Umum Proses Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Di BPP Cisarua Dengan Petunjuk BPLPP	100

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan di subsektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini perkembangan peternakan sapi perah terlihat semakin mendapat perhatian pemerintah. Sasaran pengembangan usaha peternakan sapi perah pada akhir Pelita IV adalah meningkatkan produksi susu dalam negeri sehingga sekurang-kurangnya dapat menyamai volume susu impor sebagai langkah menuju swasembada susu dalam jangka panjang (Anonim, 1984).

Khusus dalam swasembada susu telah lama pemerintah mengusahakan pencapaian kebutuhan dalam negeri tersebut. Salah satu usaha merintis ke arah itu adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan pertanian (dalam hal ini di subsektor peternakan dengan komoditi sapi perah) dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani sapi perah.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penyuluhan pertanian ini terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan baik dalam bidang materi penyuluhan, metoda, media maupun dalam hal lain misalnya sistem kerja penyuluhan. Untuk itu suatu sistem kerja penyuluhan pertanian dengan nama Latihan dan Kunjungan (LAKU) telah mulai dikembangkan dalam Pelita II dan diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1975 sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki sistem kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan nama penulis.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk kritikan, analisis, dan sebagainya.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

penyuluhan pertanian di Indonesia yang ditunjang dengan perbaikan organisasi penyuluhan, materi penyuluhan, personalia dan fasilitas penyuluhan lainnya. Kemudian sistem kerja LAKU ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/1976.

Sistem kerja LAKU pada awal perkembangannya berorientasi pada upaya mendukung peningkatan produksi komoditi tanaman pangan khususnya beras. Dengan adanya reorientasi pemikiran dalam pembangunan secara terpadu sesuai dengan kebijaksanaan pokok TRIMATRA Pembangunan Pertanian, maka pelaksanaan sistem kerja LAKU diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi semua kelompok komoditi pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Dengan demikian dalam program pembinaan bagi petani sapi perah, konsep sistem kerja LAKU yang diterapkan sama halnya dengan yang diterapkan pada komoditi tanaman pangan.

Sistem kerja LAKU ini jangkauannya tidak hanya pada aspek produksi saja tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial, pertumbuhan ekonomi masyarakat tani melalui pertumbuhan atau perkembangan kelompok-kelompok tani dan kaitannya dengan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai unit ekonomi terkecil (Anonim, 1986).



Ruang Lingkup Permasalahan

Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan sistem kerja LAKU terdapat tiga prinsip dasar yang selalu harus digunakan dalam setiap kegiatan penyuluhan yang akan diselenggarakan, yang dikenal dengan nama TRILOGI PENYULUHAN, yaitu terdiri dari:

(1) terjalinnya hubungan yang akrab antara PPL dan petani (dan keluarganya) di daerah kerja masing-masing yang ditumbuhkan dan dibina dengan sistem kerja yang tertib, teratur dan berkelanjutan, (2) bahan (materi) penyuluhan yang diberikan kepada petani haruslah bersifat segar, aktual dan dibutuhkan petani pada waktu itu, (3) bahan (materi) penyuluhan yang diberikan kepada petani (baik pengetahuan maupun keterampilan) harus dikuasai oleh PPL (Anonim, 1980). Dengan adanya prinsip-prinsip dasar tersebut, maka masalah-masalah yang timbul dalam setiap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan berasal dari penyimpangan prinsip-prinsip dasar dalam TRILOGI itu sendiri.

Hasil evaluasi Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian (BPLPP) bekerjasama dengan Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan Nasional terhadap LAKU menunjukkan bahwa pelaksanaan latihan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang diberikan kepada PPL masih dititik beratkan pada teori dan masih kurang pada hal-hal yang bersifat praktis. Titik berat materi terutama pada pertanian tanaman

@Hakipantik PB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber dan penerbitnya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University

pangan khususnya padi dan kurang mempertimbangkan kebutuhan peserta akan komoditi lainnya (Anonim, 1979).

Tujuan dan Kegunaan Praktek Lapang

Secara umum tujuan praktek lapang adalah agar mahasiswa lebih mengenal masalah-masalah penyuluhan dalam rangka mengkaitakan teori yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan, serta memberi pengalaman kerja dengan cara mulai mengenal permasalahan-permasalahan di dalam situasi yang nyata.

Adapun tujuan praktek lapangan yang diselenggarakan pada WKBPP Cisarua kabupaten Bogor Jawa Barat ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan melalui sistem LAKU beserta aspek-aspeknya dalam program pembinaan petani sapi perah. Aspek-aspek tersebut adalah:

(1) untuk mengetahui pengorganisasian penyuluhan pertanian yang dikembangkan di kabupaten Bogor, (2) untuk mempelajari sistematika dan tatacara penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat BPP, (3) untuk mengamati pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan sistem kerja LAKU khususnya dalam program pembinaan petani sapi perah dan (4) untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh pelaksanaan sistem LAKU terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan bagi petani sapi perah dengan menelaah keragaan suatu kelompok tani sapi perah.

Dengan dilakukannya praktek lapang ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada penulis untuk lebih mendalami penyuluhan pertanian dalam praktek. Selain itu diharapkan hasil dari praktek lapang ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukannya, khususnya dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak BPP Cisarua.

Kerangka Pemikiran

Usaha untuk mencapai tujuan pembangunan di sektor pertanian tidak lepas dari pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terutama ditujukan untuk masyarakat tani sebagai pengelola usahatani. Penyuluhan pertanian menurut Soekandar Wiriaatmaja (1977) adalah suatu pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga tani di pedesaan dimana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau dan dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, menguntungkan dan memuaskan. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan orang dewasa yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan maupun kepentingan sasaran.

Mengenai pendidikan penyuluhan Leagens (1961) dalam Gunardi ed (1981) memberikan batasan sebagai berikut:

"Pendidikan penyuluhan adalah proses belajar mengajar bagi penduduk pedesaan tentang bagaimana hidup lebih baik dengan belajar memperbaiki usahatani, kehidupan rumah tangga dan kelembagaan masyarakat. Karena belajar dan mengajar selalu merupakan kunci pendidikan, para penyuluh harus memahami paling tidak

Tingkah laku
Pembawa
Pembaharuan

AKSI

REAKSI

Tingkah laku
Penerima
Pembaharuan

1. Komunikasi (yang mantap)
2. Peranan pembawa perubahan (image/gambaran)
3. Demonstrasi/peragaan (Pembaharuan)
4. Partisipasi/ pengikutsertaan (yang diperoleh)
5. Peranan kebudayaan lama (penggunaannya)
6. Waktu penggunaannya
7. Fleksibilitas/ke-lenturan (pelaksanaannya)
8. Kelangsungan (pelaksanaannya)
9. Sarana pemeliharaan (yang mantap)

I N T E R A K S I
&
K O M U N I K A S I

1. Motivasi
 - a. Keperluan yang dirasakan orang
 - b. Manfaat praktis
 - c. Hal yang baru
2. Kebudayaan lama
 - a. Struktur sosial *
 - b. Pola ekonomi
 - c. Pola konsumsi
 - d. Sistem nilai

INTEGRASI/
PERPADUAN

Gambar 1. Proses Rencana Pembaharuan (Niehoff dan Anderson, 1964 dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 1984)

Keterangan:

*) Struktur sosial meliputi peranan (pribadi), keke-
rebatan, status (pribadi), tingkatan kasta, etnis
(suku bangsa), politik, kewibawaan pusat, kepen-
tingan pribadi, dan kepercayaan agama yang sama
(orang-orang seiman)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa ijin pencantuman dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

petani melalui pendekatan yang luwes, penguasaan materi (teknis), alat dan metoda serta pengembangan suasana yang baik, sehingga proses penyaluran pesan dan kepemimpinannya mendapat tanggapan positif dari petani. Di lain pihak menurut Salmon Padmanegara (1973) dalam Gunardi ed (1981) keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga dipengaruhi oleh dan berhubungan erat dengan penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang lain yaitu: penelitian, pelayanan, pengaturan dan pembinaan masyarakat. Penelitian dimaksudkan adalah penelitian mengenai teknologi baru di bidang pertanian yang nantinya akan disampaikan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Sedangkan pelayanan merupakan penunjang bagi petani dalam mengelola usahatannya, misalnya penyediaan sarana produksi, perkreditan, pemasaran. Pengaturan dapat berupa pengendalian harga yang dapat merangsang petani untuk meningkatkan produksinya. Hal lain yang berkaitan erat dengan keberhasilan penyuluhan adalah pembinaan masyarakat yang berupa dukungan terutama dukungan dari pihak yang berkuasa di masyarakat.

Sistem Kerja LAKU

Sistem kerja LAKU adalah suatu sistem kerja penyuluhan pertanian secara sistematis dan berkesinambungan, yang terdiri dari latihan PPL di BPP, kunjungan PPL kepada kelompok petani serta supervisi dalam rangka program penyuluhan pertanian (Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 996/Kpts/1979).



Sistem kerja LAKU bukan metoda penyuluhan tetapi manajemen penyuluhan pertanian yang mengatur mekanisme kerja seluruh aparat dan kelembagaan penyuluhan, pemanfaatan fasilitas dan metoda penyuluhan serta pranata sosial yang ada di lingkungan petani agar terjadi komunikasi yang akrab antar para penyuluh dengan petani serta dapat mengendalikan dan membina para pelaksana dan pelaksanaan penyuluhan secara mantap, terarah dan berkesinambungan sehingga didapat hasil penyuluhan yang optimal.

Dalam pelaksanaan sistem kerja LAKU, WKBPP dibagi menjadi beberapa Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) yang merupakan wilayah kerja bagi PPL. WKPP tersebut dibagi menjadi 16 wilayah kelompok (Wilkel).

Sistem kerja LAKU ini meliputi tiga subsistem yaitu latihan, kunjungan dan supervisi. Latihan adalah penambahan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan bagi PPL sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya membina petani antara lain dengan kunjungan kepada kelompok tani di wilayah kerjanya. Latihan dilakukan di BPP secara tertib, teratur dan berkelanjutan setiap dua minggu sekali. Kunjungan adalah kunjungan kerja PPL kepada petani di wilayah kerjanya melalui pendekatan kelompok tani. Dalam waktu dua minggu semua kelompok tani dalam wilayah kerjanya yaitu 16 kelompok tani diharapkan dapat dikunjungi. Dengan kunjungan ini para petani dapat menerima pengetahuan dan keterampilan serta segala informasi yang menyangkut usahatani. Supervisi

kunjungan PPL adalah kegiatan pembinaan bagi PPL yang sedang melaksanakan tugas kunjungan yang dilakukan oleh PPM BPP. Supervisi ini dimaksudkan agar PPL dapat mentaati rencana yang ditetapkan dalam melaksanakan program, mena-
 nankan disiplin dan tanggung jawab PPL, serta agar masalah yang timbul dalam kelompok tani dapat dipecahkan secara cepat karena dikonsultasikan dengan PPM.

Metodologi Praktek Lapang

Praktek Lapang ini dilaksanakan selama dua bulan, ya-
 itu dimulai dari tanggal 27 Juli 1987 sampai dengan tanggal 27 September 1987. Lokasi Praktek Lapang adalah Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Cisarua kecamatan Cisarua kabupaten Bogor Jawa Barat.

Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan sistem kerja LAKU dan untuk melihat keikutsertaan petani dalam rangka program pembinaan dan pengembangan usaha sapi perah dilakukan penelaahan terhadap kelompok tani sapi perah yang ada di WKBPP Cisarua. Kelompok tani tersebut adalah kelompok tani Baru Tegal dan Paragajen. Pemilihan ini di-
 dasarkan pada daerah yang telah melaksanakan program penyuluhan terhadap petani sapi perah. Selain itu praktek lapang ini juga dilakukan secara magang di BPP Cisarua, yaitu de-
 ngan mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian terutama di da-
 lam pembinaan petani sapi perah yang dilakukan di WKBPP Ci-
 sarua. Untuk itu responden dalam praktek lapang ini terdiri



dari dua golongan yaitu PPL dan anggota kelompok tani. Dari pihak PPL diambil sebanyak tujuh orang PPL dan dari pihak petani untuk setiap kelompok tani diambil satu orang kontak tani secara sengaja dan 14 orang anggota kelompok tani secara acak bertingkat yaitu terdiri dari tiga orang pengurus kelompok dan 11 orang anggota biasa. Jadi secara keseluruhan ada 30 orang petani sebagai responden.

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dinas di tingkat kabupaten sampai ke tingkat wilkel yang diamati juga dari literatur-literatur yang menunjang. Sedangkan data primer diperoleh dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terhadap responden. Selain itu dilakukan pula pengamatan terlibat dengan mengikuti kegiatan latihan di BPP dan kunjungan kepada kelompok tani. Kelompok tani yang terpilih ini diikuti kegiatannya, dan bagi responden yang terpilih dikaji keterangannya.

Data yang diperoleh diolah secara tabulasi dan prosentase, yaitu dengan membandingkan jumlah responden yang memberikan jawaban tertentu terhadap responden secara keseluruhan dikalikan dengan 100 persen, kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.



KEADAAN DAN POTENSI DAERAH PRAKTEK LAPANG

Luas keseluruhan WKBPP Cisarua adalah 13 067.9 hektar, terdiri dari 2 170 hektar tanah sawah dan 10 897.9 hektar tanah darat yang meliputi satu kecamatan, satu kemantren dan 21 desa. Berdasarkan pembagian WKPP, maka WKBPP Cisarua terbagi habis ke dalam tujuh WKPP (lampiran 1).

Dari segi topografi, WKBPP Cisarua terletak pada ketinggian antara 550 m - 1 100 m di atas permukaan laut (dpl). WKPP yang relatif tertinggi adalah WKPP Tugu Selatan dan Tugu Utara. Sedangkan daerah yang relatif rendah adalah WKPP Cilember desa Cipayungdatar (lampiran 2).

Rata-rata curah hujan tahun 1986 adalah 346.83 mm dengan rata-rata hari hujan 17.5. Hujan bulanan rata-rata terbesar terjadi pada bulan Januari-Februari dan terkecil pada bulan Agustus-September. Sedangkan rata-rata curah hujan 10 tahun terakhir adalah 317.61 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 15 (lampiran 3). Apabila dihitung berdasarkan tipe Oldeman, maka WKBPP Cisarua termasuk ke dalam tipe iklim A.

Jenis tanah yang terdapat di WKBPP Cisarua hampir sama sifat fisik maupun kimianya. Secara garis besar terdiri dari tanah latosol, regosol dan andosol coklat kekuning-kuningan (lampiran 4) dengan PH tanah sawah berkisar antara 5.5-7.0 dan PH tanah darat antara 5.0-7.0.



Jumlah penduduk WKBPP Cisarua pada tahun 1986 adalah 105 452 jiwa yang terdiri dari 52 759 jiwa laki-laki dan 52 695 jiwa wanita. Sedangkan penggunaan tanah pertanian di WKBPP Cisarua terdiri dari: (1) sawah tadah hujan (185.0 ha) dan sawah pedesaan (1 195.0 ha), (2) tegalan (10 579.1 ha) dan (3) pekarangan (318.8 ha). Sehubungan dengan hal tersebut, maka organisasi tani yang ada di WKBPP Cisarua cukup banyak, dimana pembentukannya didasarkan pada sarana produksi dan pengelolaan usaha yaitu terdiri dari kelompok tani yang berusaha di bidang tanaman pangan, peternakan perikanan dan perkebunan. Secara keseluruhan jumlah kelompok tani tersebut antara lain adalah: (1) kelompok tani dewasa (112 kelompok), (2) kelompok wanita tani (12 kelompok), (3) kelompok taruna tani (10 kelompok) dan (4) kelompok pencapir (15 kelompok). Untuk membina kelompok-kelompok tersebut, maka di WKBPP Cisarua ditempatkan tiga orang Penyuluh Pertanian Madya (PPM), tujuh orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), satu orang Penyuluh Madya Penghijauan (PMP) satu orang Penyuluh Lapangan Penghijauan (PLP), Tiga orang Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian, dua orang Petugas Hama Penyakit (PHP) dan satu orang Juru Penerang (Jupen).





PENGORGANISASIAN PENYULUHAN DAN OPERASIONAL
SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN DI KABUPATEN BOGOR

Koordinasi Penyuluhan Pertanian

Usaha meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya ditempuh melalui peningkatan produksi pertanian. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan nilai guna penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan pertanian secara terpadu, tidak hanya terbatas untuk komoditi tertentu saja.

Untuk lebih memantapkan terselenggaranya penyuluhan pertanian secara terpadu maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan yang mengatur tentang hal tersebut. Koordinasi penyuluhan pertanian diatur menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.482/Kpts/LP.120/7/1985 dan secara operasional diatur dengan Surat Edaran Menteri Pertanian No.130/Mentan/II/1979 yang dijadikan petunjuk tentang pengendalian, pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (lampiran 5).

Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, koordinasi penyuluhan pertanian secara resmi diatur menurut surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor No.521.1/122/Kpts/Huk/1986. Surat keputusan itu berisi tentang penyempurnaan Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian (FKPP II) serta tugas dan fungsinya (lampiran 6).

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak isi atau sebagian isi tanpa izin tertulis dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari FKPP II dibantu oleh TIM KERJA TEKNIS FKPP II yang susunan anggota dan tugasnya dapat dilihat pada lampiran 7.

Dengan adanya FKPP II membawa pengaruh yang baik terhadap semakin mantapnya landasan dan ruang gerak penyelenggaraan penyuluhan di tingkat WKBPP, khususnya dalam penyusunan program penyuluhan dan penyelenggaraan latihan bagi PPL. Sehubungan dengan hal tersebut di tingkat WKBPP dibentuk FKPP-WKBPP sesuai dengan jumlah BPP sekabupaten Bogor. Adapun susunan organisasi dan personalianya dapat dilihat pada lampiran 8. Sedangkan hubungan program FKPP II dengan program di BPP dapat dilihat pada lampiran 9.

Dalam program pembinaan bagi petani sapi perah ternyata upaya koordinasi di tingkat lapangan masih sulit untuk diwujudkan. Petugas dari sub sektor/instansi peternakan (khususnya yang berhubungan dengan sapi perah) masih bertitik tumpu pada tugas dari dinas yang menjadi induknya. Keadaan ini sering menimbulkan overlapping dalam penyelenggaraan kegiatan. Hambatan yang ada bersifat struktural yang menyangkut tugas dinas yang diatur pemerintah pusat. Hal tersebut menyulitkan adanya integrasi antar dinas yang ada dalam lingkup Departemen Pertanian di tingkat lapangan.

Operasional Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan

Sejalan dengan mulai digalakkannya pembangunan pertanian terpadu dan polivalensi aparat penyuluhan pertanian,



maka sejak musim tanam 1980/1981 tiap BPP diharuskan membuat program pembangunan pertanian terpadu. Untuk dapat memenuhi hal tersebut maka program penyuluhan pertanian yang disusun di BPP juga merupakan program penyuluhan pertanian terpadu.

Program penyuluhan pertanian terpadu ini perlu dilaksanakan mengingat kebutuhan lapang yang luas dan beraneka ragam. Ini berarti materi yang diberikan oleh PPL dalam penyuluhan atau kunjungan-kunjungan tidak hanya terbatas pada tanaman pangan, dengan demikian sedikit banyak diharapkan dapat mengatasi kebosanan-kebosanan yang disebabkan karena tunggalnya (monoton) materi dari PPL kepada petani sebagai sasaran penyuluhan, sehingga proses belajar-mengajarnya dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh adanya materi yang bervariasi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan sebagaimana daerah-daerah lain, maka daerah tingkat II Bogor juga menggunakan sistem kerja penyuluhan pertanian dengan nama Latihan dan Kunjungan (LAKU). Sehubungan dengan pembangunan pertanian terpadu, maka sistem kerja LAKU yang dikembangkan di kabupaten dati II Bogor khususnya dalam rangka penyelenggaraan latihan di BPP, selain melibatkan seksi-seksi dalam Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten juga melibatkan dinas lain dalam lingkup Departemen Pertanian seperti Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan. Pola operasional sistem kerja LAKU ini dapat dilihat pada lampiran 10.

Dalam program pembinaan bagi petani sapi perah yang seharusnya banyak berperan sebagai pelatih teknis bagi para petugas penyuluh lapangan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Bogor. Untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang peranannya, maka akan dikemukakan mengenai struktur organisasi dan tata kerja penyuluhan pada Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Bogor.

Organisasi dan Tata Kerja Penyuluhan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Penyuluhan bukanlah sekedar penerangan, tetapi merupakan sistem pendidikan luar sekolah melalui proses belajar mengajar dan bekerja yang disertai dengan berbagai ragam golongan yang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang diarahkan kepada: (1) menimbulkan perubahan perilaku petani ke arah tujuan yang telah ditetapkan, (2) menuntun, mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku para petani sebagai sasaran penyuluhan sehingga mereka dapat mencapai taraf dan tingkat hidup yang lebih layak, (3) menimbulkan serta memelihara semangat para petani agar mereka mau dan mampu memperbaiki kegiatan usahatani mereka, dan (4) membantu para petani agar mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah mereka.

Akan tetapi berhasil tidaknya suatu sistem penyuluhan akan sangat tergantung pada organisasi kerja dan pola operasionalnya, baik pengaturan (administration) maupun penyuluhan

(extension) itu sendiri. Untuk itu pelaksanaan kegiatan penyuluhan di sub sektor peternakan secara garis besar terdapat tiga tingkatan organisasi yaitu tingkat kabupaten, tingkat WKBPP dan tingkat WKPP (lampiran 11). Kegiatan penyuluhan ini secara langsung dikepalai oleh kepala dinas dan secara fungsional dikoordinir oleh Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) dan kepala seksi penyuluhan. Dalam hal ini kepala dinas bertindak sebagai penentu kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di subsektor peternakan, sedangkan aparat fungsional menjabarkannya ke dalam penyelenggaraan penyuluhan secara operasional. Adapun fungsi tugas aparat fungsional dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat WKPP secara rinci dapat di lihat pada lampiran 12.





PROGRAM PENYULUHAN DI BPP CISARUA

Pelaksanaan Penyusunan Program Penyuluhan

Di. BFP Cisarua

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

@Hak cipta milik IPB University

Langkah I

Pengumpulan data di tingkat WKPP. Pada langkah ini yang berperan aktif adalah PPL. Untuk ini PPL menentukan secara acak tiga wilkel yang ada dalam WKPP. Informasi yang dikumpulkan baik data potensi maupun data aktual. Data aktual dikumpulkan dari pihak petani ataupun dari sumber informasi lain misalnya kepala desa atau pamong desa lainnya dan lain sebagainya.

Langkah II

Pengolahan data untuk menentukan impact point WKPP. Yang dimaksud dengan impact point adalah upaya atau kegiatan sederhana yang mudah dilaksanakan oleh petani dan mempengaruhi peningkatan produktivitas usahatani yang lebih tinggi (Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/Mentan/X/1979). Impact point yang dikumpulkan ini baik berupa faktor penentu teknis maupun sosial ekonomis yang berkaitan dan bersumber dari kalangan masyarakat tani. Selain itu diperhitungkan pula dukungan lembaga lain dan kemampuan pribadi. Dalam menentukan semua ini, kadangkala PPL meminta bantuan kepada KCD di tingkat kecamatan, kepala desa

maupun kontak tani. Akan tetapi pihak-pihak tersebut berpartisipasi hanya pada tahap memberi informasi saja.

Langkah III

Pengumpulan hasil pengolahan data oleh PPL di BPP. Data yang diperoleh PPL yang ada di seluruh WKBPP diolah kembali. Langkah ini ditujukan untuk menentukan impact point yang berlaku untuk seluruh WKBPP. Dalam hal ini yang berperan aktif adalah PPM-BPP, karena data diolah dan dirumuskan kembali oleh PPM sesuai dengan petunjuk dari PPS kabupaten. Hasil olahan dan perumusan kembali ini dijadikan sebagai kerangka dasar konsep I program.

Langkah IV

Musyawarah dan penarikan input dari pihak luar BPP. Pada langkah ini pihak BPP-Cisarua telah melibatkan pihak-pihak yang tergabung dalam ikatan koordinasi di tingkat kecamatan terutama dari subsektor pertanian, unsur petani dan lembaga tingkat desa/kecamatan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Secara fisik keterlibatan pihak luar BPP adalah tinggi, ini dinyatakan oleh 100 persen PPL responden. Akan tetapi bila dilihat dari tingkat keterlibatannya dengan berdasarkan ukuran aktif, cukup aktif dan pasif, maka hanya pihak PPM yang terlibat aktif sebagai pihak penentu dan mempunyai wewenang penuh, sedangkan pihak lainnya hanya terlibat secara fisik dan formalitas saja (lampiran 13).

Untuk itu pada langkah ini secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar. Langkah ini hanya sekedar melengkapi kebutuhan informasi yang secara prinsip tetap berada pada jalur kerangka program I. Untuk dapat lebih meyakinkan langkah ini biasanya dilakukan dua kali. Hal demikian menunjukkan bahwa program penyuluhan di BPP Cisarua belum mencerminkan bertemunya kepentingan bersama. Menurut PPL dan sumber informasi informal dari petugas dalam BPP, hal ini ternyata berpengaruh terhadap kurang mantapnya pihak dinas dan instansi lain dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian yang disusun itu. Masing-masing pihak berinduk pada tugas dari dinas/instansi tempat bekerja.

Langkah V

Pengesahan program penyuluhan pertanian tingkat BPP dilakukan di BPP oleh PPM-BPP beserta semua pihak yang hadir. PPM-BPP mengesahkan dan pihak lain ikut mengesahkan. Jadi pada langkah ini PPM-BPP yang berperan aktif. Naskah yang telah disahkan dikirimkan ke Dinas Pertanian untuk diperiksa dan disahkan.

Langkah VI

Pelaksanaan program penyuluhan pertanian tingkat BPP. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perbaikan dan penambahan.



Apabila diperhatikan keenam langkah penyusunan program penyuluhan pertanian di BPP Cisarua maka akan terlihat adanya kesesuaian pola umum dengan konsep atau petunjuk dari BPLPP (lampiran 14).

Rencana Kerja PPL

Penetapan rencana kerja adalah suatu proses pengambilan keputusan yang rasional, yang dimulai dengan merangkai-kan kegiatan mengungkapkan aspirasi, analisa data dan informasi untuk menetapkan masalah, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah dan kesempatan untuk menggerakkan tenaga, kemampuan teknologi, bahan peralatan, perlengkapan dan dana yang diperlukan. Rencana kerja PPL adalah suatu pernyataan tertulis mengenai apa-apa yang akan dilakukan di wilayah kerjanya dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya rencana kerja PPL bisa dilihat dari dua segi. Pertama sebagai kewajiban dinas untuk memperoleh anggaran pembiayaan kerja dan kedua sebagai pedoman kerja bagi PPL di lapangan. Kunjungan PPL ke seluruh wilkel yang menjadi tanggung jawabnya merupakan bagian dalam keseluruhan program kerja PPL.

Dalam membuat rencana kerja ini PPL seharusnya mengikutsertakan petani, karena petani adalah sasaran penyuluhan. Walaupun dalam rencana kerja tersebut PPL tidak dapat lepas memasukkan program dari BPP yang telah digariskan, tetapi harus diusahakan adanya keserasian antara program



dari BPP yang dibawa PPL dengan minat dan kebutuhan yang dirasakan petani, sehingga tidak terjadi bias dalam program pembangunan pertanian.

Sehubungan dengan rencana kerja PPL ini, dari tujuh PPL responden yang menyatakan melibatkan kontak tani dalam penyusunan rencana kerjanya sebanyak 71 persen, dan sisanya (29 persen) belum melibatkan petani. Hal-hal yang umumnya menghambat dan menyulitkan PPL dalam mengikutsertakan kontak tani dalam penyusunan rencana kerja antara lain:

(1) petani sulit ditemui karena banyaknya pekerjaan. Ini terjadi karena jam kerja PPL bertepatan dengan waktu dimana petani berada di tempat usahatani. Sebenarnya kesulitan ini tidak perlu terjadi bilamana PPL mau mendatangi petani (dalam rangka menyusun rencana kerja) pada saat para petani beristirahat, misalnya pada waktu malam hari. Untuk dapat mencapai hal tersebut mungkin dapat diatasi dengan jalan memberikan insentif agar PPL termotivasi untuk bekerja dengan baik. Insentif tersebut misalnya berupa uang lembur atau fasilitas lainnya seperti sepeda motor untuk mengatasi jauhnya jarak antara domisili PPL dengan petani, (2) rendahnya tingkat pendidikan petani, dimana hal ini dapat mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja PPL dikarenakan sulitnya petani untuk mengungkapkan masalah dan kebutuhan mereka. Kesulitan dalam mengungkapkan masalah dan kebutuhan ini juga dikarenakan petani belum merasa membutuhkan untuk ikut serta dalam penyusunan rencana kerja PPL.



Sebenarnya apabila PPL mempunyai metoda pendekatan yang baik hal ini mungkin dapat diatasi. Misalkan dengan pendekatan kekeluargaan dimana hubungan antara PPL dengan petani adalah kawan bukan sebagai petugas pemerintah dengan petani, sehingga petani akan dengan leluasa mengungkapkan masalah dan kebutuhannya, dan (3) belum mengenal keadaan daerah kerja karena baru dipindahkan dari tempat tugasnya yang lama.

Realisasi rencana kerja PPL dari seluruh responden ternyata tidak ada seorangpun yang menyatakan seluruh rencana kerjanya tercapai. Sebanyak 57 persen menyatakan sebagian besar tercapai dan sebanyak 29 persen responden menyatakan kira-kira separuhnya tercapai. Sedangkan yang menyatakan sebagian kecil tercapai hanya sebanyak 14 persen.

Dari hal tersebut di atas terlihat bahwa walaupun banyak kesulitan-kesulitan dalam mengikutsertakan petani pada proses penyusunan program kerja PPL, ternyata realisasi rencana kerja lebih dari 50 persen tercapai. Hal ini dengan catatan selama program berjalan disertai dengan revisi-revisi program yang disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapang, sehingga ada kemungkinan apabila tidak terjadi revisi program maka realisasi dari rencana kerja PPL akan tercapai dengan sangat minim. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 14 persen PPL responden dimana PPL menerapkan semua program sesuai dengan yang telah disetujui BPP tanpa mengadakan revisi, ternyata realisasi rencana kerjanya hanya

sebagian kecil saja yang tercapai. PPL ini tidak mengadakan revisi program dikarenakan dia berpendapat bahwa dalam mengadakan penyuluhan dia harus berusaha menyadarkan petani untuk mau menerima program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menerapkan pada usahatannya sesuai dengan anjurannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih adanya salah pengertian mengenai arti penyuluhan itu sendiri pada petugas penyuluh lapangan. Hal tersebut menyebabkan penyuluhan pertanian menjadi bersifat instruktif, dimana penyuluh tidak lagi bertindak sebagai pembimbing dan membantu petani dalam mendapatkan cara yang paling baik dan menguntungkan usahatannya, melainkan penyuluh hanya menginstruksikan program-program dari atas kepada petani. Sehingga wajarlah apabila realisasi rencana kerjanya hanya sebagian kecil saja yang tercapai, karena cara, bahan dan sarannya tidak disesuaikan dengan keadaan kebutuhan maupun kepentingan sasaran.

Program Penyuluhan Bagi Petani Sapi Perah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan program adalah pernyataan tertulis mengenai keadaan, masalah, tujuan serta cara mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk sistematika yang teratur. Untuk itu program penyuluhan bagi petani sapi perah pun tidak terlepas dari hal-hal tersebut. Keterangan lebih lanjut mengenai program penyuluhan bagi petani sapi perah di WKBPP Cisarua adalah sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Keadaan

Sapi perah yang dikembangkan di WKBPP Cisarua adalah dari jenis Frisian Holland dan peranakannya. Populasi yang ada sampai dengan bulan Maret 1987 adalah 939 ekor. Produksi susu rata-rata tiap ekor, tiap hari adalah 12 liter. Dalam tingkat penerapan teknologi yang dicapai adalah:

- (1) Kontak Tani : 77 persen
- (2) Peteni Maju : 68 persen
- (3) Peteni Biasa : 48 persen

Yang dimaksud dengan kontak tani disini adalah petani sapi perah yang telah berpengalaman dalam mengelola usaha peternakannya, mempunyai pengaruh dalam lingkungannya, dinamis dan berpandangan positif terhadap hal-hal baru dan aktif membantu pemerintah dalam usaha mengadakan penyuluhan serta produktivitas usahataniya tinggi. Selain itu kontak tani ini merupakan ketua kelompok tani. Adapun yang dimaksud dengan peteni maju adalah peteni yang sudah mengetahui dan melaksanakan teknologi baru yang mempunyai ciri-ciri progresif, efisien dan berswadaya. Peteni maju ini biasanya merupakan pengurus dari kelompok tani. Sedangkan yang dimaksud dengan peteni biasa adalah peteni yang dalam hal penerapan teknologi tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan peteni maju maupun kontak tani. Pada umumnya mereka merupakan anggota biasa (bukan pengurus ataupun ketua) dalam kelompok tani.



Masalah

Masalah-masalah yang ada dalam usaha peternakan sapi perah di WKBPP Cisarua dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 1. Masalah Dalam Usaha Peternakan Sapi Perah Di WKBPP Cisarua Tahun 1987

No.	"Impact Point"	Masalah	
		Perilaku *)	Non Perilaku **)
1.	Umur beranak Pertama	35 % belum tahu 20 % belum yakin	25 % kurang modal
2.	Saat kawin setelah beranak	25 % belum tahu 20 % belum paham	-
3.	Penanganan pasca panen	20 % belum tahu 15 % belum yakin	20 % kurang modal
4.	Cara pemerahan	10 % belum tahu	-

Sumber: Program Penyuluhan Pertenian BPP Cisarua, 1987.

Keterangan:

- *) Yang dimaksud dengan masalah perilaku adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek sikap, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Dalam hal ini tingkatannya adalah tahu, paham dan yakin.
- **) Yang dimaksud dengan masalah non perilaku adalah masalah di luar aspek sikap, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Misalnya modal, sarana produksi, manajemen maupun lahan.

Dari tabel 1 di atas dapat diterangkan bahwa pada impact point umur beranak pertama masalah perilaku yang



ada adalah 35 persen belum tahu, 20 persen belum yakin. Hal ini berarti 45 persen sudah merasa yakin. Sedangkan dalam non perilaku masalahnya adalah 25 persen kurang modal, ini berarti 75 persen petani tidak mempunyai masalah dalam permodalan yang mungkin ada kaitannya dengan pemberian kredit sapi dari Koperasi Peternek Sapi Perah dan Produksi Susu (KPS) Bogor. Pada impact point saat kawin setelah beranak masalah perilaku yang ada adalah 20 persen belum tahu, 20 persen belum paham. Hal ini berarti 55 persen dari petani sudah paham dan yakin. Pada impact point penanganan pasca panen masalah perilaku yang ada adalah 20 persen belum tahu, 15 persen belum yakin. Hal ini berarti 65 persen sudah merasa yakin. Sedangkan dalam non perilaku 20 persen kurang modal, yang berarti 80 persen tidak mempunyai masalah dalam hal permodalan. Pasca panen yang dilakukan antara lain adalah pembuatan karamel, tahu susu dan kerupuk susu. Yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa penanganan pasca panen yang dilakukan belum sampai pada taraf komersial, akan tetapi masih dalam taraf subsisten (untuk memenuhi kebutuhan sendiri) dan juga pembuatannya tidak rutin, tetapi hanya sesekali saja jika petani dan keluarganya menginginkan hal tersebut. Pada impact point cara pemerahan ternyata hanya 10 persen yang belum tahu sedangkan sisanya (90 persen) sudah tahu, paham dan yakin. Jadi secara keseluruhan usaha peternakan sapi perah yang dilakukan petani di WKBPP Cisarua

© Hak cipta milik IPB University

IPB University



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

sudah mengalami banyak kemajuan dalam kurun waktu lebih kurang enam tahun, yaitu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1987. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan dalam hal perilaku maupun non perilaku pada berbagai impact point dimana dalam perubahan perilaku umumnya petani sudah sampai pada taraf paham dan yakin.

Tujuan

Berdasarkan keadaan impact point dan masalah yang ada maka tujuan program penyuluhan bagi petani sapi perah di WKBPP Cisarua adalah untuk meningkatkan produksi susu pada tahun 1987 dari rata-rata 12 liter/ekor/hari menjadi 15 liter/ekor/hari.

Cara Mencapai Tujuan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan program dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, maka digunakan berbagai metode penyuluhan agar dapat bermanfaat dan efektif bagi sasaran penyuluhan. Untuk lebih jelasnya, cara mencapai tujuan program dapat di lihat pada tabel 3.

Dari tabel 3 tersebut terlihat bahwa metode penyuluhan yang digunakan oleh PPL pada umumnya cenderung lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat teoritis. Hal ini terlihat dari penggunaan alat kelengkapan yang hanya berupa alat tulis. Penggunaan metode yang seperti ini mungkin berkaitan erat dengan skill dari penyuluh itu sendiri

Tujuan	"Impact Point"	Masalah Perilaku	Metoda	Petugas	Sasaran	Kelengkapan
Meningkatkan produksi susu dari rata-rata 12 liter/ekor/hari menjadi 15 liter/ekor/hari	1. Umur beranak pertama	35% belum tahu 20% belum yakin	kursus tani widia-wisata anjarsana	PPL/PPM KCD ternak	petani maju petani biasa	alat tulis
	2. Saat kawin setelah beranak dan bunting	25% belum tahu 20% belum paham	idem	idem	idem	alat tulis alat IB
	3. Penanganan pasca panen	20% belum tahu 15% belum yakin	kursus tani anjarsana	PPL/PPM	petani maju petani biasa wanita tani	alat tulis
	4. Cara pemerahan	10% belum tahu	idem	idem	petani maju petani biasa wanita tani teruna tani	alat tulis

Sumber: Program Penyuluhan Pertanian BPP Cisarua, 1987



yang masih lemah dalam hal teknis pengelolaan usaha sapi perah. Untuk mengatasi dalam jangka waktu yang sementara PPL meminta bantuan pada KCD peternak tingkat kecamatan untuk ikut serta dalam penyuluhan bagi petani sapi perah, disamping itu PPM juga ikut serta.

Selanjutnya usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan PPL ini telah dilakukan oleh BPP bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Bogor yaitu dengan mengirimkan PPL untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan teknis peternakan sapi perah yang diadakan di Wilayah Kabupaten Dati II Bandung Jawa Barat. Pengadaan latihan bagi PPL ini diperuntukkan untuk PPL seluruh propinsi Jawa Barat dalam rangka menunjang terlaksananya program polivalensi aparat penyuluhan pertanian.





PELAKSANAAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN DI WKBPP CISARUA

Identitas PPL Responden

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa PPL yang menjadi responden seluruhnya berjumlah tujuh orang. Identitas PPL responden ini diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi antara lain umur, pendidikan formal dan informal, pengalaman kerja menjadi PPL status dan pekerjaan sampingan serta jarak tempat tinggal dari WKPP.

Status para responden berdasarkan hasil analisa data kuesioner adalah sebanyak 86 persen telah menikah dan sisanya 14 persen belum menikah. Bagi mereka yang telah menikah rata-rata memiliki tanggungan keluarga sebanyak tiga orang. Keadaan ini paling tidak merupakan suatu kendala yang dapat mengurangi kebebasan PPL bekerja secara maksimal, walaupun 100 persen responden tersebut menyatakan tidak mempunyai pekerjaan sampingan.

Dalam hal letak tempat tinggal, para PPL mempunyai jarak yang bervariasi dari BPP, yaitu berkisar antara 1 - 21 kilometer dari BPP. Sebanyak 57 persen bertempat tinggal kurang dari lima kilometer dari BPP, 14 persen tinggal 10 kilometer dari BPP dan 29 persen bertempat tinggal 21 kilometer dari BPP. Akan tetapi seluruh PPL (100 persen) bertempat tinggal dalam WKPPnya, karena ini

sudah merupakan peraturan dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa setiap PPL harus bertempat tinggal dalam WKPP-nya, jika belum maka mereka harus secepatnya berpindah tempat di WKPP yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam mengatasi jarak dari tempat tinggal ke tempat tugasnya (BPP maupun kelompok tani) PPL menempuhnya dengan berjalan kaki atau naik kendaraan umum, karena tidak ada fasilitas kendaraan untuk mengatasi jarak yang cukup jauh tersebut. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para PPL hanya berupa tas kerja saja. Kurangnya fasilitas ini menurut mereka mengakibatkan kurangnya motivasi untuk lebih giat bekerja.

Pendidikan responden umumnya adalah Sekolah Pertanian Menengah Atas (86 persen), dimana usia responden terpusat pada kelompok umur 25-35 tahun (72 persen) dengan pengalaman kerja 6-10 tahun (43 persen) (lampiran 15). Dengan kondisi yang demikian ini diharapkan mereka merupakan tenaga-tenaga potensial dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh pertanian lapang. Yang perlu dicatat disini adalah bahwa dalam pendidikan non formal di bidang pertanian yang dimiliki responden umumnya didapat melalui kursus atau latihan yang sifatnya memantapkan pengetahuan yang sudah ada pada mereka. Adapun pendidikan informal yang didapat oleh responden adalah latihan orientasi PPL dan kursus PPL dasar selama kurang lebih dua tahun.



Latihan Di BPP

Pelaksanaan Latihan Di BPP

Pengertian latihan bagi PPL dalam sistem kerja LAKU sebenarnya tidak terbatas pada latihan-latihan di BPP. Hal ini berarti bahwa para PPL dituntut untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan belajar mandiri baik dengan membaca buku-buku, brosur, majalah dan media cetak lainnya, konsultasi dengan pejabat atau atasan setempat, mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga penelitian atau perguruan tinggi atau staf ahli dan proyek-proyek pertanian, mengikuti seminar, lokakarya dan sebagainya di luar mengikuti latihan di BPP. Uraian berikut ini hanya membahas latihan di BPP, yaitu latihan teknis dan latihan rutin. Yang dimaksud dengan latihan teknis di sini adalah latihan yang diselenggarakan secara insidental serta tergantung pada anggaran yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan latihan rutin adalah latihan bagi PPL yang diselenggarakan secara teratur dan berkesinambungan setiap dua minggu sekali.

Penyelenggaraan latihan bagi PPL ini bertujuan untuk:

- (1) menambah dan meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan para PPL baik teori maupun praktek, dan
- (2) menghimpun dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani ataupun PPL di lapang. Untuk mencapai tujuan latihan tersebut maka prinsip yang selalu harus dipegang adalah:



- (1) latihan harus tertib, teratur dan berkelanjutan, (2) materi latihan harus selalu sesuai dengan keadaan lapang, (3) pembahasan topik harus mendalam, (4) latihan mencakup baik teori maupun keterampilan, (5) latihan harus sanggup memecahkan masalah-masalah teknis di lapangan yang dihadapi petani, dan (6) peserta latihan diusahakan agar berpartisipasi aktif.

Kegiatan latihan rutin bagi PPL dilaksanakan pada hari Rabu minggu ke dua dan minggu ke empat. Jadwal latihan di BPP Cisarua dibuat setiap tahun dengan mencantumkan waktu, materi latihan dan pengajar dalam latihan tersebut. Materi latihan didasarkan pada tujuan program penyuluhan pertanian WKBP pada setiap tahun, yang pembuatannya berdasarkan pada impact point.

Pelaksanaan latihan rutin ini ternyata telah berjalan dengan teratur, yaitu setiap dua minggu sekali selalu diadakan latihan. Hal ini terlihat dari seluruh PPL responden hanya 14 persen yang menyatakan latihan kadang-kadang tidak dilaksanakan, sedangkan sisanya (86 persen) menyatakan latihan selalu teratur dilaksanakan dua minggu sekali.

Walaupun latihan telah dilaksanakan secara terkoordinasi agar dapat diikuti secara terus-menerus oleh PPL, ternyata 43 persen responden sekali-kali tidak hadir dalam latihan karena berbagai alasan seperti keperluan dinas, urusan keluarga dan lain-lain. Tetapi dari hasil wawancara mereka selalu berusaha untuk hadir dalam acara latihan di BPP.



Partisipasi PPL dari segi keaktifan bertanya atau terlibat secara aktif dalam latihan, ternyata baru mencapai 43 persen PPL yang selalu aktif atau mengemukakan pendapat, sedangkan 57 persen lainnya hanya kadang-kadang saja mengemukakan pendapat. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak acuh terhadap latihan, karena ternyata dari tujuh orang PPL responden semuanya selalu membuat catatan tentang materi latihan.

Dalam pelaksanaan latihan di BPP seperti yang diperoleh dari pengamatan, PPM BPP bertindak sebagai penanggung jawab. PPM BPP bertindak sebagai pelatih hanya jika dalam keadaan darurat, yaitu pada saat pelatih utama tidak hadir. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan latihan terdiri atas pembukaan, penyampaian informasi dan instruksi dinas, pemecahan masalah dan penyampaian materi latihan dan penutup.

Latihan dimulai pada jam 09.00 WIB. Sebelum waktu yang ditentukan biasanya PPL telah hadir di BPP. Latihan dimulai bila pelatih yang ditentukan telah hadir. Akan tetapi berdasarkan analisa data kuesioner dan pengamatan dalam latihan di BPP selama dua bulan, ternyata para pelatih utama yang telah ditentukan jarang hadir, sehingga PPM BPP yang lebih sering menjadi pelatih untuk menggantikan pelatih utama dan kadangkala juga PPL yang mempunyai pengalaman ataupun keterampilan lebih yang memberikan materi latihan (hal ini dinyatakan oleh 100 persen PPL

responden). Hal ini secara prinsip adalah kurang baik karena latihan tidak terselenggara secara tertib. Selain itu kurangnya penguasaan materi latihan oleh PPM akan sangat berpengaruh pada jalannya latihan di BPP dan kunjungan PPL ke kelompok tani.

Pembukaan latihan dilakukan oleh pimpinan BPP, dimulai dengan pembeberan garis besar tentang acara latihan, pengumuman dan informasi tugas-tugas rutin yang harus diselesaikan khususnya dalam waktu dua minggu mendatang. Di samping itu PPL mengumpulkan laporan periodik kunjungan PPL.

Pada pemecahan masalah, pimpinan latihan biasanya memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan masalah-masalah yang dijumpainya yang belum dapat diselesaikan. Masalah yang disampaikan itu kemudian dibahas bersama. Jadi pemecahannya tidak terbatas pada pimpinan latihan

sesama peserta pun dapat mengemukakan alternatif pemecahan masalah yang umumnya didasarkan atas pengalaman mereka.

Dalam latihan PPL, kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini terlihat dari banyaknya masalah-masalah yang dikemukakan. Akan tetapi dari hasil mengikuti beberapa kali latihan, masalah yang disampaikan seringkali hanya berkisar pada masalah pelayanan, alokasi dana, fasilitas yang diberikan, tunjangan PPL yang belum turun dan lain sebagainya yang dihadapi PPL, sedikit sekali yang menyangkut masalah petani di lapang. Dari hasil pengamatan latihan di lapang ternyata masalah yang



dikemukakan dalam latihan PPL hanya sekitar 15 persen yang menyangkut masalah yang dihadapi petani, sedangkan sisanya (85 persen) menyangkut masalah PPL itu sendiri.

Sehubungan dengan pemecahan masalah ini maka dari tujuh orang PPL didapatkan sebanyak 57 persen mendiskusikannya dengan PPM, 14 persen dengan PPM dan PPL lain dan 29 persen dengan PPM, PPL dan KCD. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagai rujukan utama PPL dalam pemecahan masalah adalah PPM BPP. Akan tetapi tidak berarti masalah tersebut akan dapat diselesaikan, karena PPM sendiri terkait dengan birokrasi yang ada.

Penyampaian materi latihan merupakan acara pokok dalam penyelenggaraan latihan, yaitu dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan PPL dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan ini akan lebih mudah tercapai bila disajikan secara praktek di samping teori. Dalam acara ini apabila ada dinas lain dari lingkup departemen pertanian akan memberikan atau menambahkan materi latihan, maka dilakukan setelah pelatih utama yang telah ditentukan selesai memberikan latihan.

Materi latihan dapat diberikan atau disampaikan dengan berbagai metoda yang tentunya mempengaruhi PPL dalam menerima materi tersebut, khususnya dalam hubungannya dengan penyampaian materi kepada petani sebagai sasaran penyuluhan. Adapun metoda yang sering dipakai dalam penyampaian materi latihan adalah ceramah, diskusi dan



praktek di kelas dalam arti penggunaan alat peraga yang digunakan dalam kelas/ruangan. Akan tetapi tidak setiap latihan mempergunakan alat peraga. Alat peraga ini penggunaannya hanya terbatas untuk sekedar ditunjukkan kepada peserta latihan. Jadi praktis materi yang diberikan lebih banyak bersifat teoritis. Hal ini lebih dipertegas dengan pernyataan dari 86 persen responden bahwa penyampaian teori lebih dari 50 persen (lampiran 16). Metoda praktek, khususnya praktek di lapangan yang merupakan metoda efektif bagi penambahan kecakapan dan keterampilan PPL ternyata belum digunakan secara seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan latihan masih kurang efektif. Kurangnya metoda praktek ini antara lain karena kurangnya fasilitas yang tersedia di BPP dan juga skill pelatih yang minim (dalam hal ini adalah PPM-BPP karena pelatih utama yang diharapkan jarang hadir dalam latihan).

Selain itu materi yang diberikan dalam latihan umumnya tentang teknis pertanian, dimana titik beratnya terutama pada pertanian tanaman pangan (lampiran 17). Hal ini sering dikeluhkan PPL karena sehubungan dengan polivalensi aparat penyuluhan yang mana PPL pada saat ini tidak hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan pada petani tanaman pangan saja, tetapi juga pada petani-petani di subsektor lainnya terutama peternakan yang merupakan potensi yang cukup besar (dalam hal ini sapi perah).

Relevansi Materi Latihan

Materi latihan yang diterima PPL ternyata belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dari seluruh responden sebanyak 57 persen menyatakan materi latihan sebagian besar sesuai, dan sisanya (43 persen) menyatakan sebagian kecil sesuai (lampiran 18). Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikemukakan tentang penyusunan program latihan di BPP, karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kunjungan adalah keikutsertaan PPL dalam penyusunan program latihan sehingga latihan yang diadakan akan sesuai dengan kebutuhannya. Keikutsertaan PPL dalam penyusunan program latihan di BPP sebanyak 43 persen PPL responden menyatakan selalu ikut serta, sedangkan 57 persen lainnya menyatakan sekali-kali ikut serta.

Namun demikian kegiatan latihan di BPP ini dirasakan ada manfaatnya bagi PPL, yaitu adanya hubungan yang akrab antar PPL maupun antara PPL dan atasannya. Manfaat lain yang dirasakan oleh PPL adalah berupa penambahan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Akan tetapi latihan lebih banyak memberikan tambahan pengetahuan bagi PPL. Latihan yang bertujuan menambah pengetahuan, kecakapan dan keterampilan bagi PPL belum sepenuhnya tercapai. Manfaat tambahan kecakapan baru dirasakan 57 persen responden dan tambahan keterampilan baru dirasakan oleh 29 persen responden (lampiran 19). Tambahan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan terutama

dirasakan oleh para PPL yang mempunyai pengalaman kerja yang masih baru yaitu sekitar dua tahun. Belum terpenuhinya tujuan latihan ini berkaitan erat dengan kurangnya latihan dengan metoda praktek.

Kunjungan PPL

Kunjungan adalah aktifitas penyuluhan yang dilaksanakan oleh PPL di wilayah kerjanya. Pendekatan yang dilakukan PPL sehubungan dengan tugasnya adalah beragam, tetapi dalam telaahan ini dibatasi pada kunjungan PPL ke wilayah kerja berdasarkan ukuran kelompok. Dalam wilayah kerjanya yaitu WKPP PPL diharapkan dapat membina 16 kelompok tani. Pada umumnya yang menjadi tujuan kunjungan PPL ke setiap wilayah kelompok yang ada di wilayah kerjanya adalah:

(1) menyampaikan informasi baru kepada para petani. Informasi ini adalah mengenai apa yang perlu diketahui oleh petani untuk kepentingan usahatani, (2) menyampaikan dan mengajarkan pengetahuan pertanian yang dibutuhkan petani, (3) mengajarkan keterampilan teknik bertani, (4) mengajarkan mengenai penggunaan bahan-bahan pertanian, (5) mengajarkan penggunaan alat-alat pertanian, (6) bersama-sama dengan petani memeriksa keadaan lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan, (7) membina para petani agar mereka suka dan bisa menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan (8) menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan pada waktu kunjungan untuk dibawa



ke dalam pertemuan di BPP. Kunjungan kepada 16 kelompok tani tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam dua minggu atau delapan hari kunjungan, sehingga dapat dilakukan kunjungan secara tertib, teratur dan berkelanjutan.

Namun pada kenyataannya banyak hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kunjungan PPL. Hal ini terlihat dari jumlah kelompok tani yang dapat dikunjungi oleh PPL dalam waktu dua minggu di WKPPnya, yaitu kunjungan yang seharusnya diharapkan dapat mengunjungi 16 kelompok tani dalam setiap periode kunjungan belum dapat dilakukan atau terlaksana sepenuhnya. Bahkan tidak ada responden yang berhasil mengunjungi lebih dari 10 kelompok. Sebanyak 71 persen responden hanya berhasil mengunjungi 5-9 kelompok tani, sedangkan 29 persen lainnya hanya berhasil mengunjungi 1-4 kelompok tani (lampiran-20). Kenyataan ini menunjukkan bahwa maksimal baru 56 persen dari target kunjungan yang dapat dipenuhi. Ketidak berhasilan PPL dalam mengunjungi 16 kelompok tani dalam setiap periode kunjungan antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan insidental seperti rapat-rapat dinas, adanya kegiatan PPL seperti aktifnya dalam kegiatan di desa, jauhnya jarak tempat tinggal PPL terhadap wilayah, adanya gangguan cuaca serta keadaan wilayah kerja yang medannya agak berat, baik ditinjau dari topografi maupun luasnya, ataupun hari kunjungan berimpit dengan hari libur. Selain hal tersebut di atas penyebab kurang berhasilnya PPL mengunjungi 16 kelompok tani adalah karena menurut mereka beberapa

kelompok taninya sudah maju sehingga kunjungan PPL dilakukan bila ada undangan atau pemberitahuan tentang kegiatan kelompok yang akan diadakan. Seharusnya alasan demikian tidak boleh ada dalam orientasi PPL sebagai penyuluh lapangan, karena justru kelompok tani yang telah maju harus selalu dibina dan diikuti kegiatannya agar kelompok tani tersebut tidak mati (vacuum) kegiatannya yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian dan pembinaan PPL. Mengenai halangan hari kunjungan sehingga PPL tidak dapat mengunjungi kelompok tani sesuai dengan jadwal yang telah ada, seharusnya PPL mengganti waktu kunjungan dengan hari lain yang disepakati bersama antara PPL dan kelompok tani. Tetapi pada kenyataannya tidak semua responden melakukan penggantian kunjungan. Secara keseluruhan hanya 14 persen responden yang melakukan penggantian kunjungan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, baik pada waktu sore atau malam harinya maupun hari lain sesuai persetujuan bersama antara PPL dan kelompok tani. Sedangkan sisanya (86 persen) menyatakan tidak mengganti kunjungan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Dari hal-hal tersebut di atas yaitu PPL baru dapat memenuhi 56 persen dari target kunjungan dan sedikitnya PPL yang mengganti hari kunjungan yang tidak dapat ditepati, maka telah menunjukkan bahwa frekwensi interaksi antara PPL dan petani di WKBPP Cisarua adalah sangat rendah. Hal lain yang juga menunjukkan frekwensi interaksi yang rendah adalah hanya 29 persen yang memanfaatkan kunjungan tambahan

yaitu mengadakan kegiatan di luar waktu kunjungan seperti kursus tani, pertemuan gabungan kelompok tani dan sebagainya. Sedangkan sisanya sebesar 71 persen tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan frekwensi interaksi antara PPL dan petani.

Supervisi Kunjungan PPL

Supervisi kunjungan PPL merupakan aktifitas pembinaan PPL yang telah melaksanakan tugas kunjungan di wilayah kerjanya. Supervisi dimaksudkan agar PPL dapat melakukan kunjungan secara tertib, teratur dan berkelanjutan sehingga program dapat dilakukan sesuai dengan rencana, menanamkan disiplin kerja dan tanggung jawab PPL serta untuk memecahkan secara cepat masalah yang timbul.

Supervisi dilakukan oleh PPM-BPP ketika PPL sedang melakukan kunjungan kepada kelompok tani. Supervisi ini dapat dilakukan setiap saat, minimal sekali dalam dua minggu pada saat PPL mengadakan tugas kunjungan kepada kelompok tani, baik dilapang maupun di ruangan.

Mengenai kegiatan supervisi yang dilakukan oleh PPM BPP, PPL responden menyatakan bahwa supervisi belum dapat dilaksanakan secara tertatur (dinyatakan oleh 71 persen responden). Hal ini antara lain dikarenakan adanya keperluan dinas yang sifatnya insidental seperti rapat-rapat, tugas-tugas administrasi yang harus diselesaikan oleh PPM dan luasnya wilayah kerja.



1. Cipta, dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Kegiatan supervisor ketika mengadakan supervisi kunjungan PPL antara lain memeriksa buku harian PPL dan mendaftarkaninya, memberikan saran-saran mengenai penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan pembinaan kelompok tani, serta memeberikan materi atau memecahkan masalah bila dikehendaki oleh PPL, hal ini dinyatakan oleh 100 persen PPL responden.

Adapun tanggapan PPL tentang adanya supervisi ternyata tidak semua responden memberikan tanggapan senang dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh PPM -BPP. Dari seluruh responden ternyata hanya 43 persen yang memeberikan tanggapan senang. Hal ini dikarenakan PPL merasa mendapat perhatian dari atasannya sehingga semua kekurangan-kekurangan mereka dalam menjalankan tugas diketahui oleh PPM sehingga dapat dicari usaha untuk memperbaikinya serta diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul.

Selain itu dengan adanya supervisi kepada kelompok tani, anggota kelompok tani juga merasa diperhatikan sehingga mereka akan berusaha lebih baik dalam melaksanakan kegiatan kelompok. Sedangkan sisanya sebanyak 57 persen responden memberikan tanggapan biasa-biasa saja dengan adanya supervisi, karena memang sudah menjadi tugas supervisor (lampiran 21)

Pembinaan Kelompok Tani Sapi Perah

Di WKBPP Cisarua

Disamping wawancara yang dilakukan dengan petugas-petugas, maka dalam praktek lapangan ini dilakukan pula wawancara dengan beberapa petani sapi perah (30 orang) yang dipilih secara acak bertingkat. Semua petani yang diambil adalah anggota kelompok tani sapi perah, dengan pertimbangan bahwa mereka inilah yang menjadi sasaran langsung dari kunjungan PPL.

Waktu dan Tempat Kunjungan

Dari segi waktu dan tempat kunjungan, maka dari jawaban responden yang didapatkan ternyata rata-rata dari responden menyatakan kurang sesuai (lihat tabel 3).

Tabel 3. Tanggapan Petani Responden Terhadap Waktu dan Tempat Kunjungan PPL Tahun 1987

Tingkat kesesuaian	Pernyataan Responden	
	Waktu (%)	Tempat (%)
Sesuai	6.7	6.7
Kurang sesuai	20.0	83.9
Tidak sesuai	73.3	-

Frekuensi Kunjungan

Ada tiga kemungkinan jawaban dalam menilai frekuensi kunjungan PPL ke petani, yaitu sering, sedang dan jarang. Tanggapan petani sapi perah terhadap frekuensi kunjungan PPL dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tanggapan Petani Responden Terhadap Frekuensi Kunjungan PPL (1987)

Jawaban	Pernyataan Petani Responden (%)
Sering	33.3
Sedang	20.0
Jarang	46.7

Dari 33.3 persen responden yang menjawab sering, ternyata mereka adalah kontak tani, kepala desa dan petani pengurus yang tinggalnya berdekatan dengan kontak tani. Sedangkan dari 20 responden yang menjawab sedang adalah pengurus kelompok yang tinggal agak jauh dari rumah kontak tani karena PPL biasanya mengadakan kunjungan ke rumah kontak tani. Dari hal tersebut terlihat bahwa sebagian PPL cenderung kepada kontak tani dan pengurusnya.



Metoda dan Materi

Dari segi metoda dan materi yang digunakan PPL, maka tanggapan responden umumnya menyatakan kurang sesuai. Hal ini dapat terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Tanggapan Petani Responden Terhadap Materi dan Metoda Penyuluhan Yang Digunakan PPL (1987)

Tingkat kesesuaian	Pernyataan responden	
	Materi (%)	Metoda (%)
Sesuai	33.3	6.7
Kurang sesuai	44.4	84.3
Tidak sesuai	23.3	-

Metoda penyuluhan yang sering digunakan adalah ceramah dan diskusi. Sedangkan materi yang diberikan lebih banyak tentang bagaimana mengelola suatu kelompok agar dapat maju dan dinamis. Materi mengenai teknik peternakan sapi perah yang lebih dibutuhkan petani kurang diberikan oleh PPL. Hal ini dikarenakan PPL kurang mampu dalam teknis pengelolaan usaha sapi perah. Sehingga antara PPL dan petani terjadi rintangan (barrier) komunikasi. Rintangan komunikasi ini terjadi karena perbedaan karakteristik sistem komunikasi dan karakteristik pribadi kedua belah pihak. Karakteristik sistem komunikasi seseorang terjadi

karena adanya tiga lingkungan pengaruh yaitu lingkungan pengaruh hubungan antar pribadi, lingkungan pengaruh hubungan sosial dan lingkungan pengaruh budaya.

Makin besar perbedaan karakteristi sistem komunikasi makin sukit komunikasi dilakukan. Sebaliknya makin kecil perbedaannya makin mudah komunikasi dilangsungkan. Komunikasi antara PPL dan petani seringkali mengalami hambatan-hambatan antara lain disebabkan oleh; (1) perbedaan kepentingan; dalam mengadakan penyuluhan kepada kelompok tani PPL tidak lepas dari program yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan kesulitan PPL adalah menyatukan kepentingan pemerintah dengan petani; (2) perbedaan tingkat pendidikan; karena pendidikan petani umumnya relatif rendah maka para petani cenderung menghendaki hal-hal yang bersifat praktis, contoh-contoh nyata. Sedangkan PPL lebih cenderung menyampaikan hal-hal yang teoritis karena PPL merasa kurang terampil dalam teknis pengelolaan sapi perah. Kurang terampilnya PPL disebabkan oleh polivalensi aparat penyuluhan yang merupakan tugas baru bagi PPL, di mana sebelumnya PPL dikhususkan untuk menyuluh petani tanaman pangan saja, sehingga pengetahuan, kecakapan dan keterampilan cenderung masih terfokus pada pertanian tanaman pangan.





KERAGAAN KELOMPOK TANI SAPI PERAH

Kelompok adalah kesatuan dari dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain.

Suatu kelompok akan berakhir sebagai kelompok manakala interaksi mental di antara anggota-anggotanya tidak ada (Anderson dan Parker dalam Nuril Huda, 1982).

Tidaklah mudah menumbuhkan dan mengembangkan suatu kelompok, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tujuan kelompok itu sendiri, sifat-sifat anggotanya, cara pembentukan kelompok (dengan paksaan, kebetulan atau sukarela) dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto (1981) ada beberapa persyaratan suatu kelompok, yaitu:

- (1) Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebahagian dari kelompok yang bersangkutan;
- (2) Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain;
- (3) Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan Departemen Pertanian (1979) yang dimaksud dengan kelompok tani adalah kumpulan petani (dewasa, wanita, pemuda) yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama dalam lingkungan pengaruh seorang kontak tani sebagai pemimpin kelompok.

Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Dalam menelaah keragaan kelompok tani, dalam hal ini adalah melihat apa yang dapat ditampilkan oleh kelompok tersebut, maka dilihat motif orang untuk berkelompok dan dinamika kelompok itu sendiri.

Motif orang untuk berkelompok ini berkaitan erat dengan kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan mengikuti kelompok. Maslow (1954) membagi kebutuhan ke dalam beberapa golongan, yaitu: kebutuhan fisik sehari-hari (physiological needs) yang merupakan kebutuhan dasar manusia; kebutuhan akan keselamatan (security needs); kebutuhan berkeadilan atau kebutuhan sosial (social needs); kebutuhan memperoleh kehormatan (esteem needs) dan kebutuhan untuk memperoleh kapasitas kerja, aktualisasi diri (self actualization needs). Kebutuhan orang untuk berkelompok ini juga berkaitan erat dengan dinamika kelompok yang mempengaruhi penampilan kelompok.

Dinamika kelompok menurut Jenkins (1961) dalam Suyatna (1982) adalah kekuatan-kekuatan di dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya dalam mencapai tujuan kelompok. Untuk melihat dinamika kelompok tani yang dalam hal ini adalah kelompok tani sapi perah dipakai ukuran dinamika menurut Cartwright dan Zander (1960) yang telah dijelaskan oleh Rusidi (1978) yang meliputi: struktur kelompok, fungsi tugas, pengembangan dan pemeliharaan kelompok serta suasana kelompok.



Kelompok tani yang terpilih untuk penelaahan dalam praktek lapang ini adalah dua kelompok tani sapi perah. Kelompok tani tersebut adalah kelompok tani Baru Tegel dan Kelompok Tani Paragajen.

Identitas Petani Responden

Petani yang terpilih sebagai responden seluruhnya berjumlah 30 orang, masing-masing 15 orang dari setiap kelompok tani. 15 orang tersebut terdiri dari seorang kontak tani, (ketua kelompok tani), tiga orang pengurus kelompok dan sebelas orang anggota kelompok. Adapun keadaan responden dari masing masing kelompok tani tersebut meliputi keadaan umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tanggungan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran penyuluhan.

Tanggungan keluarga responden pada kedua kelompok tani berkisar 3.4 jiwa untuk kelompok tani Paragajen dan 4.8 jiwa untuk kelompok tani Baru Tegel. Seluruh responden telah berkeluarga dengan tanggungan rata-rata 0.9 isteri dan 3.9 anak untuk kelompok tani Baru Tegel dan seorang isteri serta 2.9 anak untuk kelompok tani Paragajen (lihat lampiran22)

Sedangkan dalam hal umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian baik pokok maupun tambahan, hubungannya dapat dilihat pada tabel 6 untuk kelompok tani Baru Tegel dan pada tabel 7 untuk kelompok tani Paragajen.



Tabel 6. Identitas Petani Responden Kelompok Tani Baru Tegal Berdasarkan Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian (1987)

Kelompok Umur	Pernyataan Petani Responden (%)								
	Tingkat Pendidikan			Mata Pencaharian					
	SD	SLP	SLA	Pokok		Tambahan			
				UPSP	LUPSP	UPSP	LUPSP	TA	
21-30	6.7	-	6.7	13.3	-	-	6.7	6.7	
31-40	13.3	-	6.7	13.3	6.7	6.7	-	13.3	
41-50	20.0	13.3	-	20.0	13.3	13.3	6.7	13.3	
51+	26.7	-	6.7	26.7	6.7	6.7	-	26.7	
Jumlah	66.7	13.3	20.1	73.3	26.7	26.7	13.4	60.0	

Keterangan:

SD = Sekolah Dasar/ sederajat

SLP = Sekolah Lanjutan Pertama/ sederajat

SLA = Sekolah Lanjutan Atas/ sederajat

UPSP = Usaha Peternakan Sapi Perah

LUPSP = Luar Usaha Peternakan Sapi Perah, yang dalam hal ini terdiri dari berdagang, petani sayuran, buruh bangunan, pegawai di Unit Pelaksana Ternak (UPT).

TA = Tidak Ada

Tabel 7. Identitas Petani Responden Kelompok Tani Paragajen Berdasarkan Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian (1987)

Kelompok Umur	Pernyataan Petani Responden (%)							
	Tingkat Pendidikan			Mata Pencaharian				
	SD	SLP	SLA	Pokok		Tambahan		
				UPSP	LUPSP	UPSP	LUPSP	TA
21-30	33.3	-	-	33.3	-	-	-	33.3
31-40	13.3	-	-	13.3	-	-	6.7	6.7
41-50	20.0	-	-	20.0	-	-	6.7	13.3
51+	26.7	6.7	-	33.3	-	-	6.7	26.7
Jumlah	93.3	6.7	-	99.9	-	-	20.1	80.0

Keterangan:

- SD = Sekolah Dasar/sederajat
- SLP = Sekolah Lanjutan Pertama/sederajat
- SLA = Sekolah Lanjutan Atas/sederajat
- UPSP = Usaha Peternekan Sapi Perah
- LUPSP = Luar Usaha Peternekan Sapi Perah, yang dalam hal ini terdiri dari berdagang, buruh bangunan.
- TA = Tidak Ada

Dari tabel 6 dan 7 terlihat bahwa keadaan umur responden dari kedua kelompok tani relatif sama. Apabila ditentukan pada kelompok umur 21 - 50 tahun merupakan kelompok umur yang berpotensi dalam pengelolaan usaha peternakan sapi perah, maka responden pada kelompok tani Baru Tegal dan Paragajen sejumlah 66.7 persen termasuk kelompok umur yang berpotensi.

Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, responden pada kedua kelompok tani menunjukkan keadaan yang berbeda. Pada kelompok tani Baru Tegal tingkat pendidikan responden relatif lebih tinggi, yaitu minimum tamat Sekolah Dasar/ sederajat (sebesar 66.7 persen), 13.3 persen tamat Sekolah Lanjutan Pertama/ sederajat bahkan ada tiga orang responden (20 persen) yang tamat Sekolah Lanjutan Atas/ sederajat, yang tidak terdapat pada kelompok tani Paragajen. Pada kelompok tani Paragajen 93.3 persen responden tamat Sekolah Dasar/ sederajat dan hanya 6.7 persen yang tamat Sekolah Lanjutan Pertama/ sederajat.

Dalam hal mata pencaharian tidak menunjukkan keadaan yang beragam karena pada umumnya responden mempunyai mata pencaharian pokok di bidang usaha peternakan sapi perah (99.9 persen pada kelompok tani Paragajen dan 73.3 persen pada kelompok tani Baru Tegal). Akan tetapi pada kelompok tani Baru Tegal tidak semua responden mempunyai mata pencaharian pokok di bidang usaha peternakan sapi perah,



melainkan ada responden yang mempunyai mata pencaharian pokok di luar usaha sapi perah, yaitu sebanyak 26.7 persen yang merupakan pegawai pada Unit Pelaksana Ternak (UPT). Akan tetapi walaupun mempunyai mata pencaharian pokok di luar usaha peternakan sapi perah, mereka tetap meluangkan waktu terbesar untuk mengelola usaha peternakan sapi perah. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu kepala keluarga bekerja di luar usaha peternakan sapi perah, pengelolaannya diserahkan kepada anak dan isterinya, dengan demikian perhatian utama tetap pada usaha peternakan sapi perah, bahkan karena kepala keluarga bekerja di UPT, maka ilmu yang mereka dapatkan di UPT dapat mereka terapkan dalam pengelolaan usaha peternakannya sehingga dapat berhasil baik.

Apabila dilihat dari mata pencaharian tambahan, 26.7 persen responden pada kelompok tani Baru Tegal mempunyai mata pencaharian tambahan di bidang usaha peternakan sapi perah, 26.7 persen responden di luar usaha peternakan sapi perah dan 60.0 persen responden tidak mempunyai mata pencaharian tambahan. Pada kelompok tani Paragajen, mata pencaharian responden sebesar 20.1 persen di luar usaha peternakan sapi perah dan sisanya sebesar 80.0 persen tidak mempunyai mata pencaharian tambahan. Bagi yang mempunyai mata pencaharian tambahan di luar usaha peternakan sapi perah pekerjaan tersebut tidak rutin dilaksanakan, karena perhatian utama mereka tetap pada usaha peternakan sapi perah.



Dari kenyataan tersebut di atas, diharapkan dengan kondisi yang demikian ini para petani sapi perah di dua kelompok tani dapat menjalankan usaha peternakan sapi perahnya dengan baik, karena mereka merupakan tenaga-tenaga berpotensi, selain itu pada umumnya tidak mempunyai mata pencaharian tambahan di luar usaha peternakan sapi perah danalaupun ada pekerjaan tersebut hanya dilakukan sesekali saja (tidak rutin). Dengan demikian mereka dapat lebih berkonsentrasi penuh pada usaha peternakan sapi perah yang dikelolanya.

Kelompok Tani Sapi Perah

Keadaan Umum Usaha Kelompok

Kelompok tani sapi perah Baru Tegal dan Paragajen merupakan kelompok tani domisili. Dengan demikian anggota kelompok tani tersebut bertempat tinggal berdekatan dalam satu kampung/desa. Akan tetapi khusus pada kelompok tani Baru Tegal ada beberapa anggotanya yang bertempat tinggal di luar kampung/desa, akan tetapi masih dalam lingkungan WKBP Cisarua. Hal ini dikarenakan para petani sapi perah yang ada di luar desa tersebut jumlahnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 3 - 5 orang petani, sehingga untuk membentuk kelompok dengan jumlah petani yang minim dirasa tidak mungkin. Untuk itu mereka menggabungkan diri dengan kelompok tani Baru Tegal dengan maksud agar

mereka dapat memperoleh pembinaan dalam pengelolaan usahanya, disamping itu juga agar mereka memperoleh dengan lebih mudah fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan. Anggota kelompok tani Baru Tegal yang domisilinya di luar desa ini sekitar 20 persen. Sedangkan sisanya (80 persen) bertempat tinggal dalam satu kampung baik berdekatan maupun berjauhan.

Pada umumnya status pemilikan ternak (sapi perah) anggota kelompok tani (Baru Tegal dan Paragajen) adalah merupakan pemilik dan langsung pengelolanya, dimana untuk kelompok tani Baru Tegal pemilikan sapi rata-rata 10.9 ekor dan untuk kelompok tani Paragajen rata-rata sejumlah 5.7 ekor sapi perah.

Secara keseluruhan pengalaman responden menjadi petani sapi perah berkisar antara 4 - 6 tahun, dimana alasan mereka berusaha di sub sektor peternakan sapi perah adalah karena ingin meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini disebabkan usaha di bidang peternakan sapi perah merupakan suatu usaha yang berkesinambungan dengan hasil yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu alasan mengenai sempitnya lahan pertanian menyebabkan mereka beralih kepada usaha peternakan sapi perah, karena dengan lahan yang sempit itu tidak mungkin menguntungkan jika mengadakan usaha pertanian lain. (dinyatakan oleh 100 persen responden).



Dalam hal pemasaran hasil produksi susu, 100 persen responden menyatakan memasarkannya ke koperasi (KPS Bogor), demikian pula dalam hal memperoleh input produksinya. Hal ini dikarenakan mereka adalah anggota KPS Bogor. Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh keterangan bahwa pendapatan petani rata-rata berkisar antara Rp 100 000 - Rp 200 000 per bulan untuk kelompok tani Baru Tegel dan Rp 50 000 - Rp 200 000 untuk kelompok tani Peragajen.

Latar Belakang Terbentuknya Kelompok Tani

Kelompok tani Baru Tegel terbentuk karena adanya kebutuhan petani dalam meningkatkan usahanya. Karena usaha peternakan sapi perah di desa Cibeureum menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, dalam arti populasi dan produksi masih rendah. Maka pada akhirnya para petani sapi perah dan tokoh masyarakat berkumpul yang akhirnya timbul kesepakatan untuk membentuk kelompok. Atas dukungan dari kepala desa, TRIPIDA kecamatan dan Dinas Peternakan dibentuklah kelompok tani.

Secara resmi kelompok tani Baru Tegel dibentuk pada tanggal 4 Mei 1983. Pada tanggal 20 Oktober 1983 mendapat pengukuhan dari Dinas Peternakan Bogor. Pada tahun yang sama, yaitu 1 Desember 1983 dikukuhkan oleh FKPP II sebagai kelompok tani pemula dan pada tanggal 7 Januari 1984 mendapat pengukuhan dari Bupati KDH Tingkat II Bogor sebagai kelompok tani lanjut. Sedangkan pengukuhan oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat diperoleh tahun 1986.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Kelompok tani Paragajen merupakan hasil pemecahan dari kelompok tani Baru Tegal. Hal ini diawali karena pada kampung Paragajen petani sapi perah sudah cukup banyak untuk dapat membentuk kelompok sendiri. Hal ini dimaksudkan agar domisili petani tidak terlalu berpencar, sehingga informasi yang diterima dapat lebih efektif.

Dorongan Mengikuti Kelompok

Dorongan petani untuk masuk ke dalam kelompok berkaitan dengan berbagai motivasi petani, baik dalam maupun luar dirinya. Motivasi dari dalam dapat merupakan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan menjadi anggota kelompok. Sedangkan motivasi dari luar diri petani dapat berasal dari lingkungannya, baik dari tokoh masyarakat yang berpengaruh maupun tetangganya.

Pada kelompok tani Baru Tegal dan Paragajen dorongan mengikuti kelompok tani umumnya berkaitan dengan motivasi yang berasal dari dalam. Walaupun demikian hal ini tidak terlepas dengan adanya motivasi dari luar diri petani sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan apa saja yang menyebabkan petani masuk menjadi anggota kelompok dapat dilihat pada tabel 8.

Dari tabel 8 apabila dihubungkan dengan pendapat Maslow (1954) mengenai pembagian kebutuhan, maka pada kelompok tani Baru Tegal motif orang untuk berkelompok pada umumnya merupakan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 8. Dorongan Petani Mengikuti Kelompok Tani Sapi Perah (1987)

Dorongan mengikuti kelompok tani	Pernyataan petani responden (%)	
	KT. Baru Tegal	KT. Paragejen
1. Meningkatkan kerjasama dan rasa kekeluargaan serta mempermudah pemecahan masalah *)	26.7	53.4
2. Memperoleh pembinaan serta kemudahan dalam memenuhi fasilitas produksi **)	26.7	13.3
3. Meningkatkan pendapatan dan produksi **)	13.3	20.0
4. Memudahkan pemasaran, kredit sapi dan memperoleh saprodi **)	33.3	13.3

Keterangan: *) termasuk dalam kebutuhan akan keselamatan, berkawan atau kebutuhan sosial, memperoleh kehormatan dan kebutuhan untuk memperoleh kapasitas kerja dan aktualisasi diri.

**) termasuk dalam kebutuhan fisik sehari-hari yang merupakan kebutuhan dasar manusia

fisik sehari-hari yang merupakan kebutuhan dasar manusia (73.3 persen) sedangkan sisanya sebesar 26.7 persen responden dapat digolongkan pada pemenuhan kebutuhan akan keselamatan, berkawan atau kebutuhan sosial, memperoleh kehormatan dan kebutuhan untuk memperoleh kapasitas kerja dan aktualisasi diri. Sedangkan pada kelompok tani Paragejen motif orang untuk berkelompok pada umumnya merupakan kebutuhan akan keselamatan, berkawan atau kebutuhan sosial, memperoleh kehormatan dan kebutuhan untuk memperoleh

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IPB University.

kapasitas kerja dan aktualisasi diri (53.3 persen) sedangkan sisanya yaitu 46.7 persen mempunyai motif untuk pemenuhan kebutuhan fisik sehari-hari.

Hal seperti ini sesuai dengan sifat dari masyarakat desa itu sendiri yang lebih cenderung ke arah conformity yaitu suatu penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya pada kelompok tani Baru Tegal motif orang untuk berkelompok ada kecenderungan perubahan ke arah pemenuhan kebutuhan yang lebih berorientasi komersil. Hal ini berarti telah terjadi deviation yaitu penyimpangan terhadap kaedah-kaedah dan nilai-nilai masyarakat yang biasanya terjadi karena pengaruh dari luar sistem masyarakat itu sendiri. Hal seperti ini terjadi dimungkinkan karena pada kelompok tani Baru Tegal anggota kelompoknya tidak hanya penduduk asli desa melainkan kebanyakan merupakan para pendatang dari daerah lain seperti Jawa Tengah dan sebagainya, dimana hal ini berbeda dengan kelompok tani Paragajen yang seluruh anggota kelompoknya merupakan penduduk asli desa.

Struktur Kelompok

Struktur kelompok adalah pengorganisasian atau susunan kelompok dalam rangka mencapai tujuan. Struktur kelompok ini menyangkut dua maksud, yaitu pertama bagaimana berjalannya proses pengambilan keputusan di dalam kelompok



(siapa saja dalam kelompok itu yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan; ketua saja, pengurus saja atau semua anggota, sehingga akan menentukan struktur kelompok) dan kedua adalah bagaimana sistem komunikasi yang berlaku dalam kelompok.

Proses pengambilan keputusan pada dua kelompok tani dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Pihak Yang Menentukan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Kelompok (1987)

Pihak yang menentukan	Pernyataan Petani Responden (%)	
	KT. Baru Tegal	KT. Peragejan
PPL/Petugas lain	-	-
Ketua	-	26.7
Pengurus	-	-
Anggota sendiri	-	-
Pengurus dan anggota	80.0	60.0
Tidak tahu	20.0	13.3

Dari tabel 9 terlihat bahwa secara keseluruhan pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan di dalam rapat/pertemuan kelompok antara lain pengurus dan anggota. Dengan kata lain sebagian anggota sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok. Namun bila dilihat pada tiap-tiap kelompok menunjukkan keadaan yang berlainan.

Pada kelompok tani Baru Tegal yang merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan cukup besar, yaitu 80 persen. Dalam hal ini adopsi inovasi pengambilan keputusan pada kelompok ini ditentukan melalui legitimasi ketua kelompok (kontak tani). Bila terdapat suatu inovasi sebelum anggota menerapkannya kontak tani mencoba inovasi itu terlebih dahulu. Apabila hasilnya sesuai dengan harapan maka anggota kelompok mengadopsinya. Kontak tani berperan sebagai inisiatif dalam menyebarkan inovasi di dalam kelompok. Tetapi cara yang dipakai dalam pengambilan keputusan ini dilakukan dengan musyawarah bersama anggota. Di lain pihak adapula anggota yang merasa tidak tahu siapa yang mengambil keputusan, hal ini dinyatakan oleh 20 persen responden. Ketidaktahuan mereka dikarenakan domisilinya jauh sehingga tidak dapat aktif mengikuti segala kegiatan kelompok, akan tetapi mereka selalu berusaha untuk dapat aktif di dalamnya.

Pada kelompok tani Paragajen hanya 60 persen petani yang merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di dalam kelompok. Sedangkan yang merasa tidak dilibatkan menyatakan bahwa pihak yang mengambil keputusan adalah ketua kelompok tani saja (26.7 persen) dan sisanya (13.3 persen) tidak tahu siapa yang mengambil keputusan karena mereka tidak aktif dalam kegiatan kelompok.

Dalam hal susunan pengurus, pada kedua kelompok tani sudah terbagi cukup jelas. Pada kelompok tani Baru Tegal



susunan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang dalam hal ini terdapat empat seksi yaitu seksi umum, seksi Inseminasi Buatan (IB), seksi kesehatan hewan dan seksi usaha. Pengurus-pengurus diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Berbeda dengan kelompok tani Baru Tegal, kelompok tani Paragajen selain mempunyai susunan pengurus yaitu ketua, sekretaris dan bendahara hanya terdapat satu seksi yaitu seksi informasi. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok.

Dalam hal penyampaian pesan-pesan atau informasi pertanian (dalam hal ini di sub sektor peternakan sapi perah) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kelompok dari ketua atau pengurus kelompok kepada para anggotanya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Penyampaian Pesan-pesan/Informasi Pertanian Di Dalam Kelompok (1987)

U R A I A N	Pernyataan Petani Responden (%)	
	KT. Baru Tegal	KT. Paragajen
Anggota yang biasa diberi pesan	100.0	80.0
Anggota yang tidak merasa diberi pesan	0.0	20.0

Tabel 10 menunjukkan bahwa penyampaian pesan-pesan atau informasi pertanian pada kedua kelompok tani menunjukkan keadaan yang berbeda. Pada kelompok tani Baru Tegal 100 persen anggota merasa selalu menerima atau diberi pesan. Hal ini menunjukkan bahwa semua pesan/informasi disampaikan kepada seluruh anggota. Biasanya penyampaian pesan bagi anggota yang domisilinya jauh digunakan surat yang dititipkan melalui petugas susu dari KPS Bogor. Keadaan ini berbeda dengan kelompok tani Paragajen, dimana terdapat 20 persen responden yang merasa tidak diberi pesan oleh ketua atau pengurus kelompok. Karena domisili petani tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal petani lainnya, maka hal tersebut kemungkinan diakibatkan oleh sifat dari petani yang tertutup karena faktor sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota kelompok tani lainnya bahkan untuk membuat kandang yang bersatu dengan kelompok saja mereka tidak mampu. Untuk membaikinya mereka berusaha mencari nafkah di bidang lain yang kadang kala harus keluar daerahnya. Kesibukannya mencari nafkah ini menyebabkan mereka cenderung tidak aktif dalam kegiatan/pertemuan kelompok, padahal informasi-informasi tersebut disampaikan pada saat pertemuan kelompok.

Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat terlihat bahwa kelompok tani Baru Tegal memiliki struktur kelompok yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Hak cipta milik IPB University

Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa struktur kelompok yang baik adalah yang banyak melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok dan banyaknya anggota yang sering menerima pesan informasi pertanian.

Fungsi Tugas

Fungsi tugas (task function) kelompok tani adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kelompok tani tersebut agar kelompok dapat menjalankan fungsinya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan kelompok antara lain mencari dan menyebarkan ide-ide sehingga dapat menimbulkan motivasi atau dapat menggerakkan anggotanya di dalam kelompok serta menciptakan kepuasan bagi anggota.

Dalam hal mencari informasi tentang pertanian berbagai cara telah ditempuh oleh anggota kedua kelompok tani, baik melalui media massa maupun pihak lain seperti KCD, kontak tani, anggota lainnya dan pihak lain di luar desa. Kegiatan petani dalam mencari informasi melalui media massa relatif kecil yaitu hanya 20 persen dari petani di seluruh kelompok. Petani yang bersangkutan adalah kontak tani dan pengurus kelompok dengan memanfaatkan majalah-majalah peternakan, brosur-brosur peternakan, dan televisi. Dalam hal mencari informasi dari pihak lain juga tidak semua petani aktif. Dari kedua kelompok tani rata-rata 53,4 persen anggota aktif mencari informasi sedangkan sisanya (46.6 persen) hanya menunggu diberi informasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.



Tabel 11. Kegiatan Petani Dalam Mencari Informasi Tentang Pengelolaan Usaha Peternakan Sapi Perah Menurut Sumbernya (1987)

Sumber Informasi	Pernyataan petani responden (%) *)		
	KT. Baru Tegal	KT. Paragajen	Rata-rata
PPL	13.3	6.7	10.0
KCD	86.7	73.3	80.0
Kontak tani	86.7	73.3	80.0
Anggota lain	40.0	46.7	43.4
Luar desa	66.7	40.0	53.4
Rata-rata	58.7	40.0	53.4

Keterangan:

*) Responden dapat menyatakan lebih dari satu

Dari tabel 11 terlihat bahwa kontak tani merupakan sumber utama bagi anggota dalam setiap kelompok tani. Pada kelompok tani Baru Tegal jumlah anggota yang aktif mencari informasi relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen (yaitu 58.7 persen anggota pada kelompok Baru Tegal dan hanya 40 persen anggota pada kelompok Paragajen) khususnya yang bersumber dari KCD dan pihak luar desa. Hal ini mungkin diakibatkan oleh adanya jarak fisik dan jarak sosial yang berbeda antara kelompok tani Baru Tegal dan Kelompok tani Paragajen.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan artikel atau tulisan sains lainnya
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

@Hak cipta milik IPB University
 IPB University

Yang dimaksud dengan jarak fisik disini adalah bahwa lokasi kelompok tani Baru Tegal lebih dekat dari jalan raya dan sarana transportasi tidak sulit, sedangkan kelompok tani Paragajen selain lokasinya jauh sarana transportasi pun sulit. Dengan demikian kelompok tani Baru Tegal akan lebih mudah dijangkau oleh para petugas penyuluhan maupun pihak luar desa lainnya dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen, hal ini menyebabkan informasi akan lebih banyak masuk pada kelompok tani Baru Tegal, sehingga anggota yang **mencari/menerima** informasi akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen.

Sedangkan yang dimaksud dengan jarak sosial adalah bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok tani Baru Tegal relatif lebih tinggi dan beragam dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen (lihat tabel 6 dan 7). Dengan anggapan bahwa sumber-sumber informasi dari luar desa dan KCD mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi (minimal SLTA) maka perbedaan tingkat pendidikan anggota kelompok tani Baru Tegal tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen. Dengan demikian frekwensi interaksi antara kelompok tani Baru Tegal dengan pihak luar desa dan KCD akan lebih sering dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen, sehingga jarak sosial antara kelompok tani Baru Tegal dengan pihak luar desa dan KCD akan lebih dekat dibandingkan dengan kelompok tani Baru Tegal. Hal inilah yang menyebabkan informasi lebih banyak diterima oleh anggota kelompok tani Baru Tegal.



Selain dari jarak sosial dan jarak fisik hal lain yang mungkin juga mempengaruhi adalah adanya kegiatan kelompok tani Baru Tegel yang lebih beragam dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen sehingga frekwensi interaksi dengan pihak luar desa dan KCD akan lebih sering dengan demikian jarak sosialpun akan lebih dekat.

Pada tabel 11 juga terlihat bahwa peranan kontak tani lebih menonjol pada kelompok tani Baru Tegel. Hal ini mungkin berkaitan erat dengan tingkat kepemimpinannya yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman mengelola usaha sapi perah. Dalam hal ini kontak tani dari kelompok tani Baru Tegel mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTP sedangkan pada kelompok tani Paragajen tingkat pendidikan kontak tani hanya pada taraf tingkat SD. Demikian juga dalam pengalaman mengelola usaha peternakan sapi perah, dimana kontak tani pada kelompok Baru Tegel mempunyai pengalaman kerja yang relatif lama yaitu selama tujuh tahun dengan disertai kursus-kursus lainnya mengenai teknis pengelolaan sapi perah dan juga perkoperasian. Sedangkan pada kelompok tani Paragajen kontak tani hanya berpengalaman selama lima tahun tanpa disertai kursus-kursus. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang mungkin menyebabkan perbedaan dalam kepemimpinan kontak tani yang akan mempengaruhi dinamika kelompok tani itu sendiri.



Mengenai kepuasan anggota terhadap kelompok dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh petani dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan kelompok. Manfaat tersebut antara lain berupa peningkatan keterampilan, kemudahan dalam memperoleh sarana produksi atau fasilitas lainnya ataupun dapat mempermudah pemecahan masalah yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Kepuasan Atas Kegiatan Kelompok (1987)

Faktor kepuasan	Pernyataan petani responden (%) *)		
	KT.Baru Tegal	KT.Paragejen	Rata-rata
Tambahan keterampilan	86.7	73.3	80.0
Kerjasama meningkat	100.0	100.0	100.0
Produksi meningkat	80.0	73.3	76.7
Penghasilan meningkat	86.7	80.0	83.4
Adanya fasilitas	100.0	100.0	100.0
Pemecahan masalah	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	92.2	87.8	90.0

Keterangan:

*) Responden dapat menyatakan lebih dari satu

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan 90 persen petani merasa adanya kepuasan/manfaat atas kegiatan kelompok. Manfaat terbesar berupa peningkatan kerjasama, adanya fasilitas dan pemecahan masalah (100 persen), kemudian peningkatan keterampilan (86.7 persen), tambahan penghasilan (83.4 persen) dan terendah adalah manfaat peningkatan produksi (76.7 persen). Adapun kelompok tani yang memberikan manfaat terbesar kepada anggotanya adalah kelompok tani Baru Tegel (92.2 persen). Keadaan tersebut berkaitan erat dengan banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok. Dalam hal ini kelompok tani Baru Tegel telah menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan pembagian kegiatan ke dalam seksi-seksi yang terutama dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan usaha sapi perah seperti pengadaan sarana kelompok, pembinaan anggota/pengurus (kaderisasi), pengadaan air bersih dan lain-lain. Adapun kelompok tani Paragajen belum melaksanakan kegiatan tersebut kecuali kegiatan rutin yaitu pertemuan kelompok, arisan, simpan pinjam dan lain-lain.

Pengembangan dan Pemeliharaan Kelompok

Pengembangan dan pemeliharaan kelompok mempunyai pengertian cara-cara/usaha-usaha yang ditempuh oleh kelompok untuk mempertahankan hidupnya atau memelihara partisipasi seluruh anggota. Usaha-usaha yang dapat dilakukan antara lain adanya kegiatan kelompok yang berkesinambungan,

pembagian tugas yang merata, aturan/norma dan sangsi serta fasilitas untuk mengadakan kegiatan.

Dalam hal kegiatan kelompok, seperti telah diuraikan terdapat kelompok tani Baru Tegal mempunyai kegiatan yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen. Dalam pelaksanaan program pengembangan usaha sapi perah, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan (secara bersama) antara lain pertemuan rutin, arisan, pengadaan sarana produksi dan lain-lainnya.

Dengan keadaan seperti tersebut di atas, dapat dilihat pembagian tugas dalam kelompok. Karena pada kelompok Paragajen belum dilaksanakan kegiatan yang dikoordinir dalam seksi-seksi maka pembagian tugas masih belum dapat dilihat pemerataannya. Tetapi pada kelompok tani Baru Tegal, ketua dan pengurus mempunyai tugas khusus dalam mengelola kelompok, sedangkan anggota telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, akan tetapi walaupun demikian pengurus dan ketua juga tidak terlepas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam hal aturan/norma pada kedua kelompok tani mempunyai aturan yang jelas. Peraturan tersebut berupa apabila tidak mengikuti kegiatan kelompok (terutama gotong royong) dengan alasan yang sulit untuk diterima (tidak logis) biasanya anggota tersebut akan merasa dikucilkan dari kelompoknya, hal ini berupa sangsi yang diterima anggota.

Sedangkan fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan kelompok pada kelompok tani Baru Tegal antara lain gudang makanan ternak, saung informasi kelompok, televisi, radio, uang kas, serta alat elektronik untuk mengadakan simulasi. Secara khusus hal-hal tersebut tidak dimiliki oleh kelompok tani Paragsjen. Kelompok tani Paragsjen hanya mempunyai uang kas kelompok.

Suasana Kelompok

Suasana kelompok dapat dilihat dari adanya rasa kekeluargaan dan keluasaan (tanpa kontrol yang ketat) dalam kelompok sehingga dapat menimbulkan kegairahan bekerja pada anggotanya.

Suasana pada kedua kelompok tani yang ditelaah telah menunjukkan keadaan yang baik yaitu seluruh anggota kelompok (100 persen) merasakan adanya rasa kekeluargaan dan keluasaan dalam melaksanakan kegiatan kelompok. Hal ini mungkin berkaitan dengan kondisi usaha peternakan sapi perah yang sifatnya rutin (setiap hari) dimana kandang para petani umumnya terdapat di satu lokasi sehingga mereka sering bertemu yang menyebabkan tumbuhnya rasa kebersamaan yang kuat. Sebagai salah satu contoh adalah pada waktu sapi dari seorang anggota kelompok melahirkan maka petani petani yang ada di sekitar tempat tersebut berusaha untuk menolong mengeluarkan anak sapi, padahal pada saat tersebut petani pemilik sapi itu tidak berada di tempat dengan demikian terlihatlah adanya kekeluargaan dan keluasaan yang besar.





KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil praktek lapang yang berlangsung sejak tanggal 27 Juli 1987 sampai dengan tanggal 27 September 1987 di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua kecamatan Cisarua kabupaten Bogor Jawa Barat, dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut;

Kesimpulan

Penyuluhan pertanian di kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara terkoordinasi lintas sub sektor pertanian dan didukung oleh dinas/instansi lain yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Akan tetapi dalam program pembinaan bagi petani sapi perah di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua koordinasi penyuluhan pertanian ini masih terbatas sampai pada tingkat WKBPP. Hambatan yang dihadapi dalam usaha memantapkan koordinasi sampai di tingkat lapangan terbawah (WKPP) adalah bersifat struktural antar dinas/instansi yang terlibat dalam FKPP II Bogor. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian di BPP Cisarua. Dalam hal ini BPP Cisarua telah melibatkan semua dinas dari seluruh sub sektor pertanian, unsur petani dan lembaga tingkat desa/kecamatan. Tetapi pihak dari luar BPP tersebut hanya bertindak selaku pemberi input ataupun hanya terlibat secara fisik

Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

@ak pta milik IPB University
IPB University

saja. Keputusan terakhir tetap berada pada pihak BPP dan aparatnya. Dari hasil musyawarah tersebut secara formal program penyuluhan di WKBPP Cisarua telah mewujudkan suatu program penyuluhan pertanian terpadu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja masing-masing masih bertitik tumpu pada tugas dari dinas yang menjadi induknya.

Tengenai pengaruh pelaksanaan sistem kerja LAKU terhadap pencapaian tujuan penyuluhan bagi petani sapi perah ternyata sangat kecil. Hal ini terlihat dalam program pembinaan petani sapi perah, peranan PPL sebagai pembina dan sumber informasi utama ternyata sangat rendah, karena dari hasil wawancara dengan petani hanya 10.0 persen yang merasa mendapatkan informasi dari PPL. Hal seperti ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kecakapan dan keterampilan PPL dalam teknis pengelolaan usaha sapi perah, dimana ini berkaitan dengan penyelenggaraan latihan di BPP Cisarua yang kurang memberikan latihan tentang teknis pengelolaan usaha sapi perah. Disamping itu materi yang diberikan cenderung pada hal-hal yang bersifat teoritis yang dikarenakan kurangnya tenaga pelatih dan fasilitas yang ada di BPP Cisarua. Kenyataan yang ditemui di lapangan, yang banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penyuluhan pertanian bagi petani sapi perah adalah peran dari kontak tani yang sangat besar dalam mengusahakan kemajuan kelompoknya dengan berbagai cara antara lain merintis



hubungan yang baik dengan dinas peternakan dan KPS Bogor serta lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kemajuan kelompoknya.

Dua kelompok tani sapi perah yang ditelaah ternyata telah dapat dikatakan maju. Akan tetapi bila dibandingkan di antara kedua kelompok tani tersebut terlihat bahwa kelompok tani Baru Tegal lebih maju dibandingkan dengan kelompok tani Paragajen. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Ciri-ciri Kelompok Tani Baru Tegal dan Kelompok Tani Paragajen (1987)

U R A I A N	KT. Baru Tegal	KT. Paragajen
1. Motivasi berkelompok	komersil	conformity
2. Pengambilan keputusan bersama (pengurus dan anggota)	tinggi	rendah
3. Aktifitas kontak tani	tinggi	rendah
4. Tingkat pendidikan	tinggi	rendah
5. Struktur kelompok	baik	kurang baik
6. Kepuasan anggota	tinggi	rendah
7. Suasana kelompok	leluasa dan kekeluargaan	leluasa dan kekeluargaan
8. Pengembangan dan pemeliharaan kelompok	cukup memiliki sarana	kurang memiliki sarana
9. Frekwensi interaksi dengan KCD dan pihak luar desa	tinggi	rendah
10. Jarak sosial	dekat	jauh

Saran

Untuk dapat memperbaiki penyelenggaraan penyuluhan pertanian terpadu, salah satu alternatif adalah dalam penyusunan program di BPP, pihak-pihak luar BPP terutama dari dinas-dinas lingkup Deptan pada tingkat kecamatan harus terlibat secara aktif, dalam arti turut menentukan dan merupakan pihak perancang program. Hal ini dimaksudkan agar para petugas dari masing-masing dinas lingkup Deptan dapat turut aktif membantu terselenggaranya program penyuluhan pertanian terpadu dengan sebaik-baiknya. Dengan asumsi koordinasi melalui FKPP II telah berjalan dengan baik maka salah satu alternatif untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memasukkan/menyesuaikan tugas yang dibebankan oleh dinas yang menjadi induknya dengan program BPP ataupun mengusulkan kepada dinas yang menjadi induknya agar program yang ditetapkan pada dinas tersebut dapat menunjang program di BPP, sehingga koordinasi penyuluhan pertanian akan terlaksana dengan baik sampai tingkat WKPP.

Dalam upaya memperbaiki sistem penyelenggaraan latihan di BPP perlu adanya pengadaan fasilitas yang memadai. Terutama pelatih bagi PPL jangan hanya PPM saja melainkan harus diusahakan koordinasi yang baik dengan dinas lingkup Deptan agar dapat mendatangkan pelatih-pelatih yang memiliki skill yang tinggi. Dengan demikian latihan



akan banyak bermanfaat bagi PPL di mana hal ini akan mempengaruhi hasil dari penyuluhan yang dilakukannya.

Sedangkan untuk dapat mengembangkan kelompok tani agar dapat diwujudkan sebagai swadaya petani maka perlu kiranya sifat-sifat yang ada pada kelompok tani Baru Tegal dipenuhi, misalnya motivasi berkelompok, aktifitas kontak tani dan lain sebagainya sebagaimana terlihat pada tabel 13. Hal ini dapat diusahakan dengan cara mewujudkan kelompok tani Baru Tegal sebagai contoh bagi kelompok-kelompok tani lainnya, misalkan dengan metoda penyuluhan anjongsana kepada kelompok tani Baru Tegal ataupun kelompok tani Baru Tegal mengadakan anjongsana kepada kelompok-kelompok tani lain dalam rangka pertukaran pengalaman. Dengan demikian motivasi berkelompok dari anggota kelompok tani Baru Tegal serta latar belakang yang spesifik dari kelompok tani tersebut dapat menjadi bahan perbandingan bagi kelompok tani yang lain karena kelompok tani Baru Tegal ini telah memperoleh penghargaan sebagai Juara Pertama Tingkat Nasional pada tahun 1986

Di lain pihak sebagai upaya untuk dapat mempertahankan atau melestarikan sukses yang telah dicapai oleh kelompok tani Baru Tegal ini salah satu alternatifnya adalah dengan mengadakan kaderisasi bagi anggota-anggotanya, evaluasi yang bertahap dan kontinyu dengan disertai pembinaan yang juga kontinyu.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1979. Buku Harian PPL 1980/1981. Direktorat Jendral Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bandung.

1980. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan Kerja (LAKU) Dalam Rangka Pengembangan dan Pemantapan Pola Penyuluhan Pertanian Di Jawa Barat. Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bandung.

1984. Bahan RAT Ke IV GKSI. GKSI Jakarta.

1986. Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) Yang Disempurnakan. Direktorat Jendral Tanaman Pangan. Jakarta.

Gunardi, ed. 1981. Kumpulan Bacaan Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Huda, Nuril. 1982. Pelaksanaan Penyuluhan Dengan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) Di Wilayah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Maslow, AH. 1954. Motivation and Personality. New York. Harper.

Rusidi. 1978. Dinamika Kelompok Tani Dalam Mencapai Tujuannya. Studi Kasus Di Desa Amansari Kecamatan Re-ngas Dengklok Kabupaten Karawang. Tesis Magister Sain. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1984. Sosiologi Pedesaan Jilid I. Gajah Mada University Press. Yasaguna Obor Indonesia. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Suyatna, I Gde. 1982. Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional Di Bali dan Peranannya Dalam Pembangunan. Tesis Magister Sain. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Wiriaatmadja, S. 1977. Pokok-pokok Penyuluhan Prtrtanian. CV. Yasaguna. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University

L A M P I R A N

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Lampiran 1. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan
Pertanian Cisarua (1987)

Kecamatan	WKPP	Desa
Cisarua	1. Tugu Selatan	1. Tugu Selatan 2. Tugu Utara 3. Batu Layang
	2. Cibeureum	1. Cibeureum 2. Citeko 3. Cisarua
	3. Kopo	1. Kopo 2. Leuwimalang 3. Jogjogan
	4. Cilember	1. Cilember 2. Megamendung 3. Cipayung Dar- tar 4. Cipayung Gi- rang
	5. Gadog	1. Gadog 2. Sukakerya
	6. Sukamanah	1. Sukamanah 2. Sukaresmi 3. Sukamahi 4. Sukamaju
	7. Sukagalih	1. Sukagalih 2. Kuta

©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 2. Topografi Wilayah Kerja Balai
Penyuluhan Pertenanian Cisarua
(1987)

WKPP	Desa	Ketinggian dpl
Tugu Selatan	Tugu Selatan	1 100 meter
	Tugu Utara	1 100 meter
	Batu Layang	825 meter
Cibeureum	Cibeureum	1 000 meter
	Citeko	975 meter
	Cisarua	850 meter
Kopo	Kopo	750 meter
	Leuwimalang	775 meter
	Jogjogan	750 meter
Gilember	Cilember	650 meter
	Megamendung	800 meter
	Cipayunggirang	610 meter
	Cipayungdatar	550 meter
Gadog	Gadog	600 meter
	Sukakarya	600 meter
Sukamanah	Sukamanah	720 meter
	Sukaresmi	720 meter
	Sukamehi	660 meter
	Sukameju	660 meter
Sukagalih	Sukagalih	850 meter
	Kuta	810 meter

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menguraikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisnya
a. Mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 3. Curah Hujan Di Wilayah Kerja
Balai Penyuluhan Pertanian
Cisarua (1987)

Bulan	Tahun 1986		Rata-rata 10 tahun	
	Hari	mm	Hari	mm
Januari	28	1011	21.4	613.6
Februari	20	439	19.5	470.31
Maret	22	518	16.8	463.23
April	11	263	18.8	432.27
Mei	13	198	13.5	281.4
Juni	14	245	10.8	186.66
Juli	18	216	11.7	167.57
Agustus	12	144	7.7	128.425
September	17	347	12	24.60
Oktober	17	255	14.8	304.11
November	21	234	16.7	325.87
Desember	17	292	16.4	413.37
Jumlah	210	4162	180.1	3811.415
Rata-rata	17.5	346.83	15	317.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil cipta ini tanpa izin pencipta dan merujuk ke sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB University.

Lampiran 4. Jenis Tanah Di Wilayah Kerja
Balai Penyuluhan Pertanian
Cisarua (1987)

WKPP	Desa	Jenis tanah
Tugu Selatan	Tugu Selatan	Regosol, Andosol coklat kekuning-kuningan
	Tugu Utara	----- sda -----
	Batu Layang	Latosol coklat dan Regosol
Cibeureum	Cibeureum	Regosol, Andosol coklat kekuning-kuningan
	Cisarua	Latosol coklat dan Regosol
	Citeko	Regosol, Andosol coklat kekuning-kuningan
Kopo	Kopo	Latosol coklat
	Leuwimalang	Latosol coklat dan Regosol
	Jogjogan	----- sda -----
Cilember	Cilember	Andosol dan Latosol
	Megamendung	Latosol coklat dan Regosol kelabu
	Cipayunggirang	Latosol coklat
	Cipayungdatar	----- sda -----
Gadog	Gadog	----- sda -----
	Sukakarya	----- sda -----
Sukamanah	Sukamenah	----- sda -----
	Sukaresmi	----- sda -----
	Sukamahi	----- sda -----
	Sukameju	----- sda -----
	Sukagelih	----- sda -----
Sukagelih	Sukagelih	----- sda -----
	Kuta	----- sda -----

Lampiran 5. Koordinasi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia

Pusat
1. Hak cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

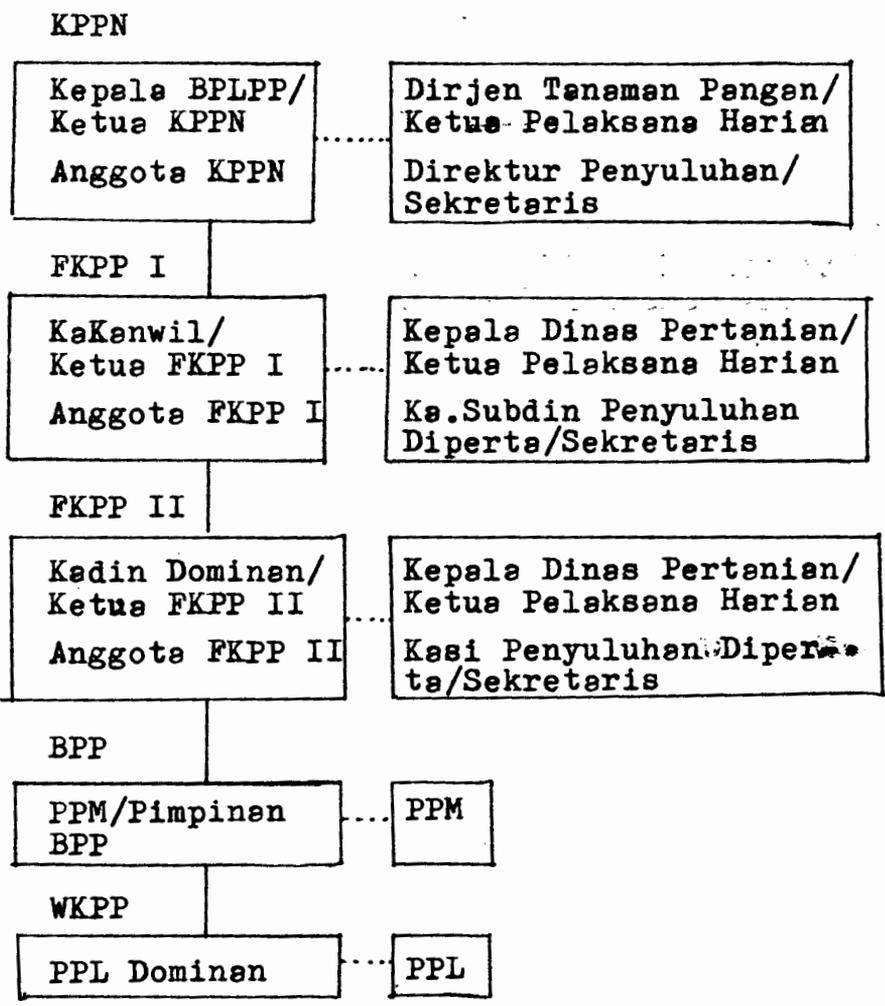
Propinsi

Kabupaten

WKBPP

WKPP

@Hak cipta milik IPB University

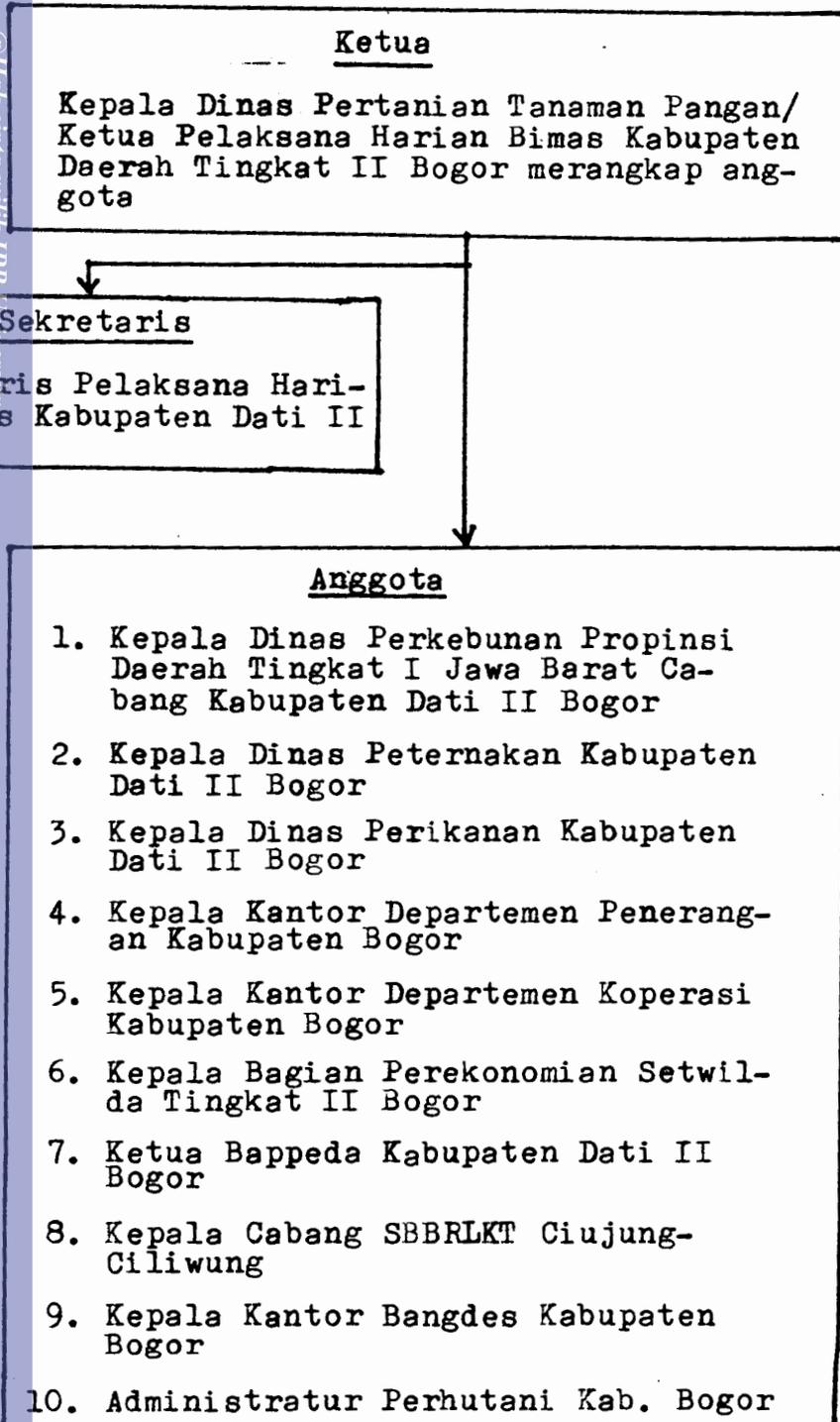


Sumber: Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Mentan/II/1979

Keterangan:

- : Garis Komando
- _____ : Garis Pelaksana

Lampiran 6. Susunan Organisasi FKPP II Kabupaten Bogor Jawa Barat



Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

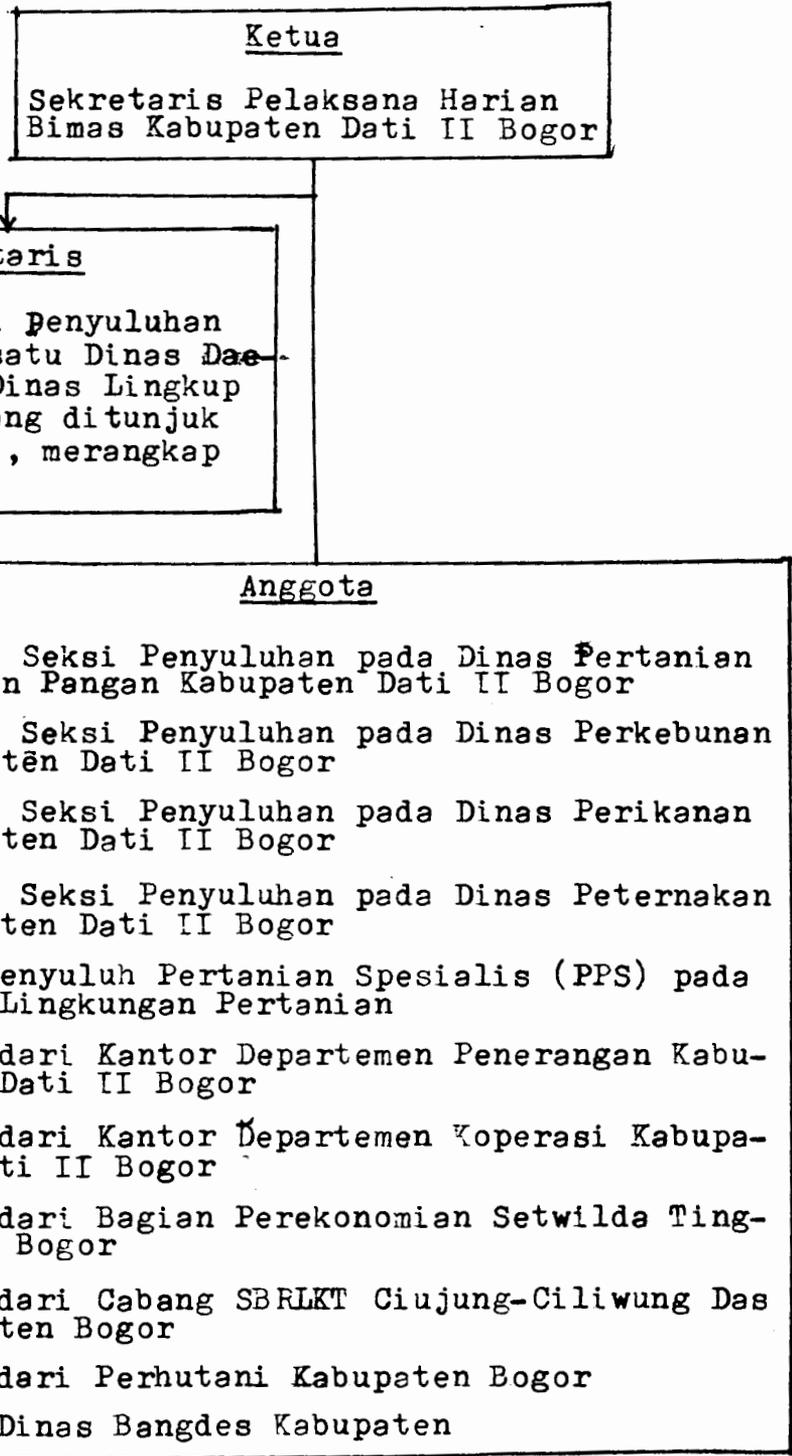


Adapun tugas pokok dari FKPP II adalah untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan serta menjabarkan kebijaksanaan regional penyuluhan pertanian ke dalam program penyelenggaraan penyuluhan pertanian daerah. Sesuai dengan tugas pokok tersebut maka FKPP II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) menyusun program penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah berdasarkan kebijaksanaan tingkat regional dengan mengikutsertakan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) dari seluruh subsektor pertanian;
- (2) menyelenggarakan koordinasi antar dinas/instansi lain yang ada kaitannya dengan penyuluh pertanian di daerah
- (3) mengadakan monitoring pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- (4) menyampaikan permasalahan penyuluhan pertanian yang tidak dapat dipecahkan oleh Forum kepada Bupati Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I (FKPP I) Jawa Barat.

Lampiran 7. Susunan Organisasi TIM KERJA TEKNIS
FKPP II Kabupaten Bogor Jawa Barat

@Hak cipta milik IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Adapun tugas TIM KERJA TEKNIS ini antara lain adalah;

- (1) menyiapkan penyelenggaraan bahan dan materi pertemuan FKPP II;
- (2) menyiapkan penyelenggaraan materi dan bahan komunikasi di luar pertemuan FKPP II antara instansi yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten;
- (3) mendokumentasikan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan FKPP II dan dalam komunikasi pada sub (2) dan memonitor pelaksanaan kesepakatan tersebut.

@Hak cipta milik IPB University

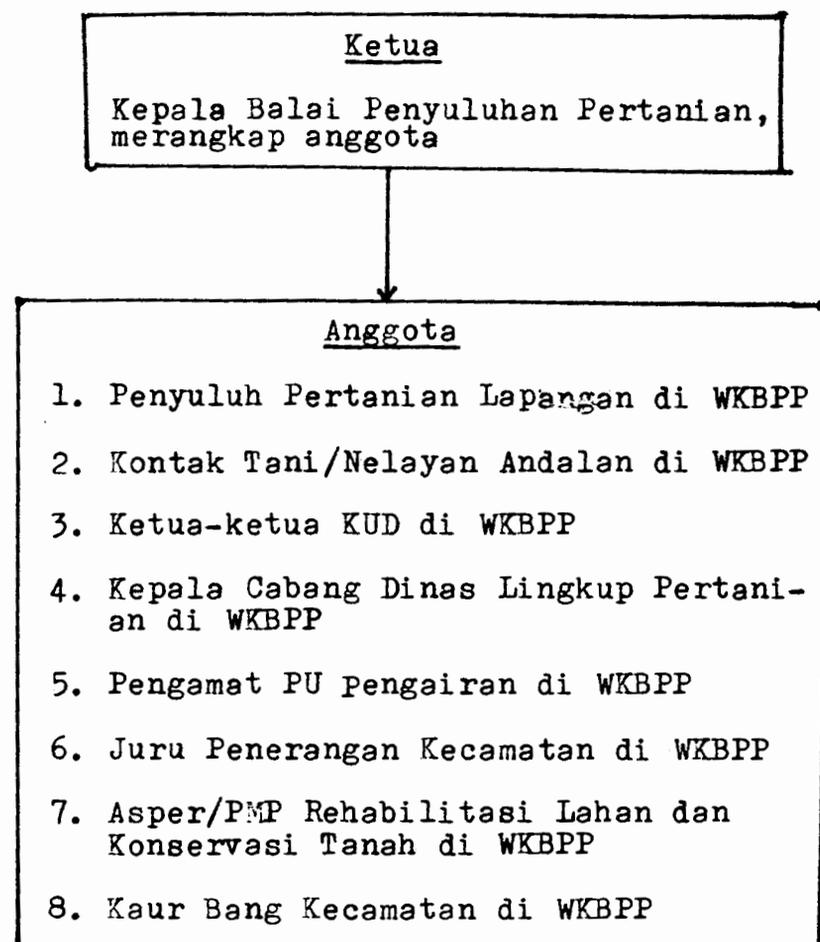
IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 8. Susunan Organisasi FKPP-WKBPP
Cisarua, Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor Jawa Barat



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 9. Hubungan Program FKPP II Dengan Program BPP (1987)

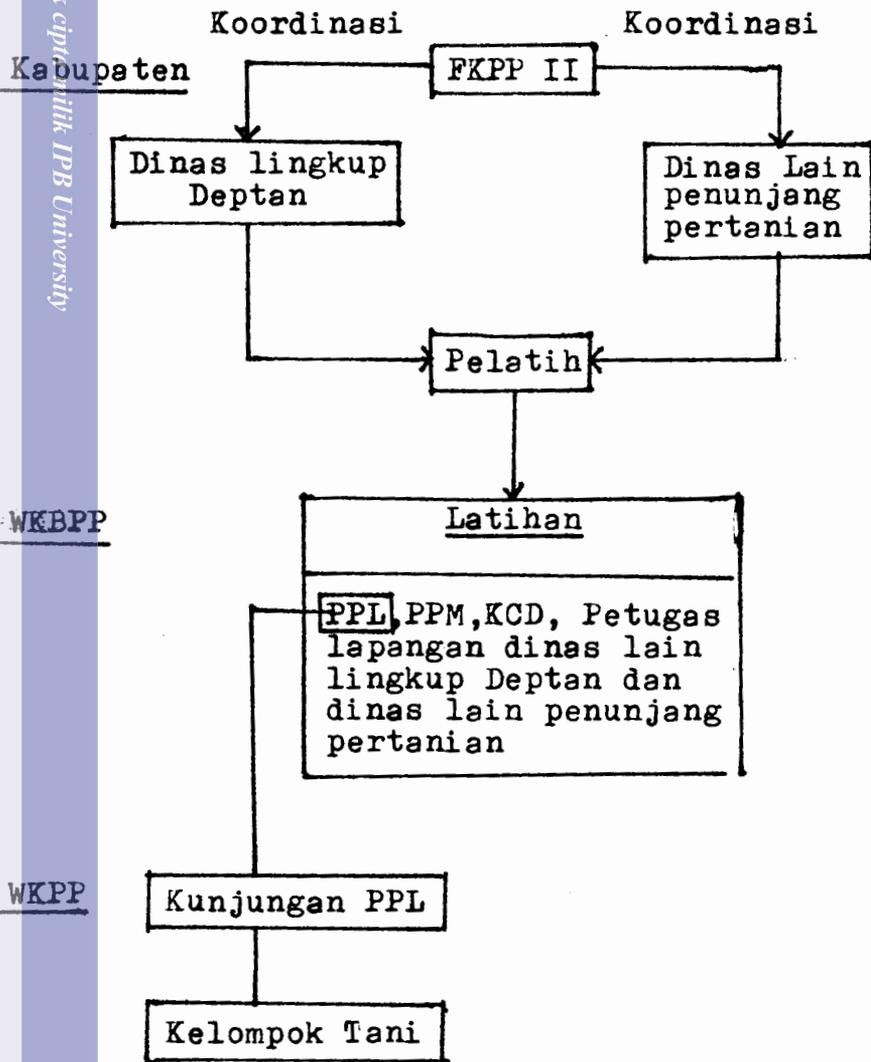
Program	Penyusun	Pemanggung Jawab	Waktu Penyusunan
P4. Kab	Dinas-dinas dikoordinasikan oleh FKPP dan KTNA. Ditandatangani oleh ketua FKPP.	Ketua FKPP	Awal November-akhir Desember
P3. masing-masing sub sektor Kab.	Dinas sub sektor bersangkutan. Ditandatangani oleh kepala dinas bersangkutan	Dinas sub sektor bersangkutan	Awal November-akhir Desember
P3. BPP	PPM dikoordinir oleh pimpinan BPP dan KTNA dengan memperhatikan saran dan masukan dari dinas-dinas dan mendapat bimbingan PPS, dilaperkan ke Ketua FKPP II dan dinas-dinas	Pemimpin BPP	Awal Januari-akhir Maret

Keterangan :

- P4. Kab : Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten
- P3. BPP : Program Penyuluhan Pertanian Tingkat BPP.

Hak cipta Ditindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 10. Pola Operasional Sistem Kerja LAKU Yang Dikembangkan Di Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat



WKBP

WKPP

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

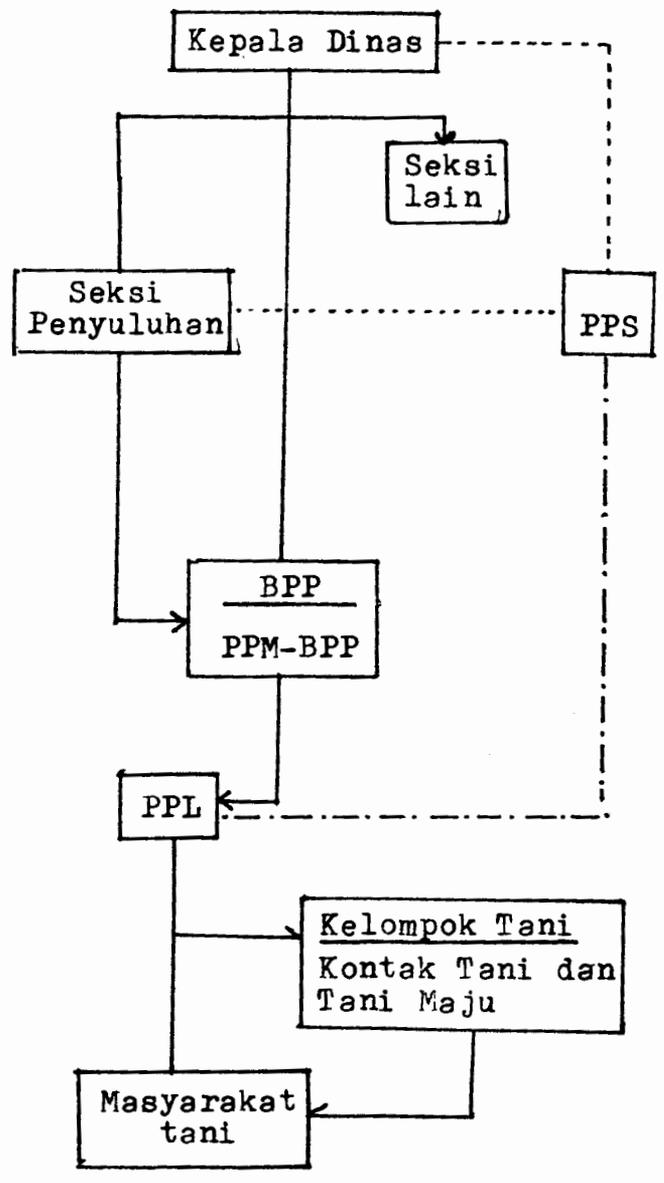
Lampiran 11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyuluhan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat

Kabupaten

@Hak Cipta milik IPB University

WKBP

WKPP



- Keterangan :
- : garis instruksi
 - : garis konsultasi dan tanggung jawab
 - : garis koordinasi
 - : garis pembinaan
 - : garis penyuluhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 12. Fungsi Tugas Aparat Fungsional
Penyuluhan Pertanian Tingkat
Kabupaten Sampai Dengan Tingkat
WKPP Pada Dinas Peternakan Bogor

Tingkat Kabupaten

Kepala Seksi Penyuluhan, bertugas:

- (1) Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan khususnya maupun berbagai tugas lain yang ada pada pihak Dinas Peternakan
- (2) Menyusun rencana anggaran belanja kegiatan penyuluhan
- (3) Merekapitulasi data dan informasi dari seluruh BPP untuk kemudian disusun sebagai bahan rencana umum program penyuluhan dan bahan laporan kepada Kepala Dinas
- (4) Memonitor dan mengelola administrasi penyuluhan sekabupaten Bogor

Penyuluh Pertanian Spesialis (PES), bertugas:

- (1) Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan
- (2) Menyiapkan dan memberikan pembinaan-pembinaan pada PPM di tingkat WKBPP dan PPL di tingkat WKPP
- (3) Mencari dan mengumpulkan masalah usahatani di sub sektor peternakan dan kemudian mencari jalan pemecahan dan percobaan di lapangan atau berhubungan dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi
- (4) Melaksanakan tugas supervisi ke BPP

Tingkat WKBPP

Sebagai pengelola BPP adalah PPM yang berada di BPP dengan mendapat bantuan dari petugas administrasi dan pengelola kebun BPP. Pada BPP Cisarua terdapat tiga orang PPM, yaitu PPM Sumber daya sebagai kepala BPP, PPM Pangan

dan PPM non Pangan (Peternakan, Perikanan dan Perkebunan).

Adapun fungsi dan tugasnya adalah sebagai berikut:

Pimpinan BPP, bertugas:

- (1) Menyusun monografi WKBPP
- (2) Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian
- (3) Menyelenggarakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
- (4) Menyelenggarakan latihan bagi PPL secara teratur dan berkelanjutan
- (5) Menyelenggarakan pertemuan dengan kontak tani secara periodik dan terencana
- (6) Menyelenggarakan koordinasi kerja penyuluhan pertanian dengan PPL dan petugas pertanian kecamatan
- (7) Menyusun laporan evaluasi kegiatan pertanian kepada Kepala Dinas
- (8) Membantu atau menyelenggarakan konsultasi serta memberikan saran dalam penyusunan program latihan kepada dinas atau PPS Kabupaten

PPM pangan dan non pangan, bertugas:

- (1) Melaksanakan tugas supervisi secara tertib, teratur dan berkelanjutan
- (2) Membantu dan bekerjasama dengan pimpinan BPP dalam mengelola BPP dan kegiatan penyuluhan pertanian di seluruh WKBPP
- (3) Memberi latihan kepada para PPL di BPP dalam keadaan darurat (bila pelatih utama tidak hadir)

Tingkat WKPP

WKPP merupakan ruang gerak kerja PPL. Pada tingkatan inilah kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan.

Beberapa tugas PPL yang penting antara lain adalah:

- (1) Membuat rencana kerja untuk dijadikan pedoman kerja. Rencana kerja disusun untuk waktu satu tahun atau satu musim tanam
- (2) Menyelenggarakan kunjungan secara tertib, teratur dan berkelanjutan ke seluruh unit-unit kunjungan sesuai dengan kerangka rencana kerja yang telah disusun
- (3) Memanfaatkan berbagai metoda penyuluhan untuk memantapkan sistem kerja LAKU
- (4) Menyelesaikan semua tugas administrasi dan laporan di luar hari kunjungan
- (5) Memantapkan dan atau mengembangkan kehidupan ber kelompok dikelengen masyarakat tani, hingga semua unit-unit kelompok yang dibentuk bisa digunakan sebagai unit komunikasi antara PPL dan masyarakat tani dan unit kegiatan belajar bersama antara sesama petani
- (7) Membina secara khusus kontak tani sehingga bisa menjadi motor penggerak kelompok tani



Lampiran 13. Tingkat Keterlibatan Peserta
Penyusunan Program Penyuluhan
di BPP Cisarua (1987)

Pihak yang terlibat	Pernyataan PPL Responden ^{*)} (%)		
	Tingkat Keterlibatan		
	Aktif	Cukup Aktif	Pasif
PPM-BPP	100	0	0
Subsektor/instansi lain	14	29	57
KUD	14	72	14
Kontak tani/unsur petani	14	29	57

^{*)} Responden dapat menyatakan lebih dari satu pihak yang terlibat

Keterangan: Aktif : menentukan dan merupakan pihak perancang program

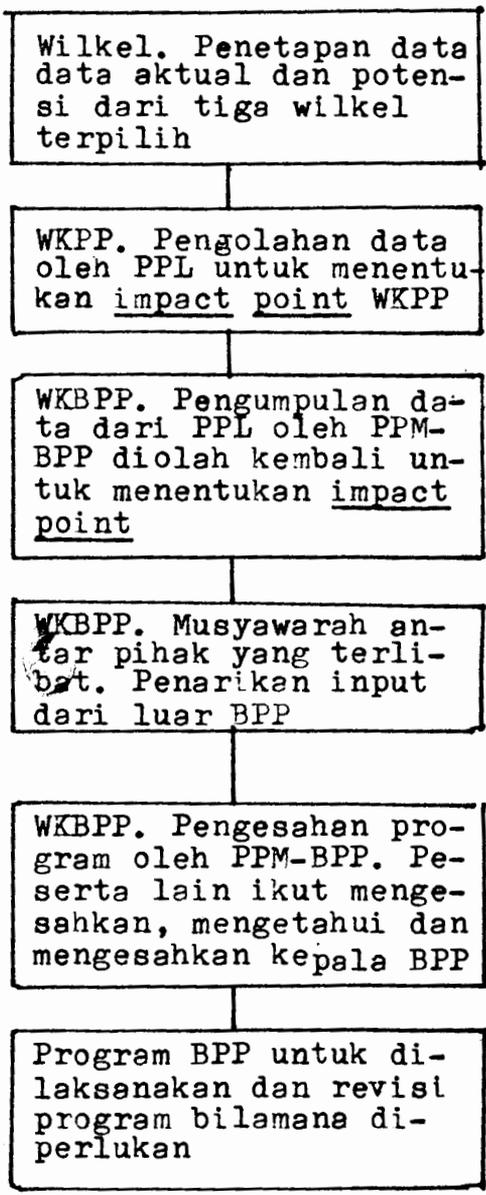
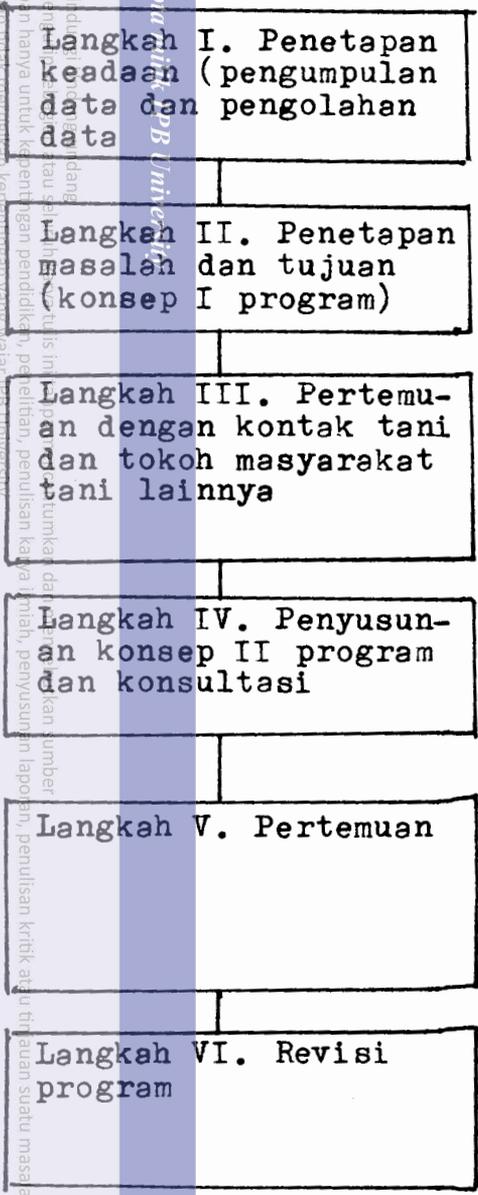
Cukup Aktif : memberi informasi dan tidak menentukan

Pasif : hanya ada di tempat

Lampiran 14^B. Kesesuaian Pola Umum Proses Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian di BPP Cisarua dengan Petunjuk BPLPP

Petunjuk BPLPP

Praktek



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau sewakan atau melakukan tindakan yang merugikan hak cipta atau hak moral.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 14^b. Konsep Penyusunan Program
Penyuluhan di Tingkat BPP

Program dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis mengenai keadaan, masalah, tujuan serta cara mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk sistematika yang teratur. Program penyuluhan di tingkat BPP disusun secara bersama antara petugas-petugas pemerintah (PPM/PPL) dari BPP, Kepala Cabang Dinas lingkup pertanian kecamatan, kontak tani serta pemuka masyarakat tani lainnya. Sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan kepentingan masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa dalam hal ini terlihat adanya penciptaan suatu program bersama rakyat, bukan semata-mata untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan hakikat penyuluhan itu sendiri, yaitu menolong rakyat agar dikemudian hari mereka dapat menolong dirinya sendiri.

Program penyuluhan disusun sesuai dengan batasan program itu sendiri, mencakup tahapan-tahapan berikut:

- (1) tahap penetapan keadaan
- (2) tahap penetapan masalah
- (3) tahap penetapan tujuan
- (4) tahap penetapan cara mencapai tujuan

Penetapan Keadaan

Penetapan keadaan adalah perumusan situasi pertanian dan dilaksanakan setelah pengumpulan dan pengolahan data. Sedangkan proses pengumpulan dilakukan setelah mempelajari kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan pertanian dan kemudian menyusun monografi WKBPP, termasuk data petani dan kegiatan usahatani yang mereka lakukan. Pengolahan data pada dasarnya merupakan usaha untuk mencari hubungan antara berbagai keadaan. Pengolahan data ini akan menghasilkan kesimpulan berupa rumusan keadaan.

Penetapan Masalah

Masalah adalah gambaran keadaan yang tidak memuaskan dan ingin dicari pemecahannya. Dalam penyusunan program dikenal dua macam masalah yaitu masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum adalah masalah luas yang dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan tujuan program. Sedangkan masalah khusus adalah masalah spesifik yang dijadikan landasan untuk merumuskan tujuan kegiatan dan merupakan pernyataan lebih lanjut dari masalah umum.

Penetapan Tujuan

Tujuan adalah rumusan program yang akan dicapai, mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum atau tujuan program adalah penetapan rumusan pernyataan umum



tentang tujuan program yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan khusus atau tujuan kegiatan adalah penetapan pernyataan pemecahan masalah khusus tentang tujuan kegiatan yang ingin dicapai.

Penetapan Cara Mencapai Tujuan

Penetapan cara mencapai tujuan adalah penyusunan suatu rencana kerja atau rencana kegiatan guna mencapai apa yang diinginkan. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyusunan suatu program penyuluhan pertanian tersebut adalah sebagai berikut:

Langkah I. Menyelesaikan tahapan pertama, yaitu pengumpulan data dan pengolahannya sehingga didapatkan rumusan keadaan. Data tersebut meliputi data aktual dan data potensial. Yang dimaksud dengan data aktual adalah data tentang keadaan yang nyata ada pada saat itu, sedangkan data potensial adalah data tentang keadaan yang mungkin dicapai.

Langkah II. Menyelesaikan tahapan II dan III, yaitu penetapan masalah dan penetapan tujuan. Dalam langkah kedua ini rumusan-rumusan keadaan, masalah, dan tujuan dibuat secara tertulis sebagai konsep pertama (konsep I program).

Langkah III. Menyelenggarakan pertemuan dengan kontak tani lainnya untuk mengecek kembali dan menyempurnakan rumusan keadaan, masalah, tujuan yang telah ditetapkan serta pengumpulan tentang saran-saran tentang cara mencapai tujuan.



Langkah IV. Menyusun konsep program (konsep lengkap)

yang meliputi rumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan (konsep II program). Selama penyusunan program perlu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Langkah V. Mengadakan pertemuan lengkap untuk mendapatkan konsensus program sehingga program tersebut dapat diakui, disepakati serta diterima bersama sebagai program BPP. Pertemuan diikuti oleh pihak masyarakat tani (kontak tani) dan pengurus BUUD?KUD serta pengurus organisasi lainnya dan juga pihak pemerintah (lurah, camat, dan dinas-dinas). Setelah selesai langkah V ini pada dasarnya program sudah dapat dilaksanakan.

Langkah VI. Revisi Program, Selama program dilaksanakan dapat dilakukan perbaikan atau revisi. Revisi harus dilakukan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara tertulis disampaikan kepada mereka.

Lampiran 15. Identifikasi PPL Responden Berdasarkan Hubungan Antara Kelompok Umur, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pendidikan (1987)

Kelompok Umur (tahun)	Pernyataan PPL Responden (%)				
	Tingkat Pendidikan		Pengalaman Kerja		
	SPMA	APT	0-5	6-10	11-15
21 - 25	14	-	14	-	-
26 - 30	29	-	-	29	-
31 - 35	43	-	14	14	14
36 - 40	-	14	-	-	14

Keterangan : SPMA : Sekolah Pertanian Menengah Atas
APT : Akademi Pertanian

Lampiran 16. Penggunaan Metoda Penyampaian Materi Dalam Latihan PPL Di BPP Cisarua (1987)

Metoda Penyampaian Materi	Pernyataan PPL Responden(%)
Ceramah/kuliah	0
Diskusi/tanya jawab	0
Ceramah dan diskusi	14
Ceramah, diskusi dan praktek di kelas	57
Ceramah, diskusi, praktek di kelas dan lapangan	29
Teori lebih dari 50 persen	86
Praktek lebih dari 50 persen	14

Lampiran 17. Bobot dan Titik Berat Materi Latihan Yang Diterima PPL Di WKBP Cisarua (1987)

U r a i a n	Pernyataan PPL Responden (%)
Bobot materi latihan	
Teknik pertanian	57
Kebijaksanaan pemerintahan	43
Penyuluhan/sosiologis	0
Titik berat materi latihan	
Tanaman pangan	100
Pernakan	0
Perikanan	0
Perkebunan	0
Hampir seimbang pada ke empat subsektor	0

Lampiran 18. Relevansi Materi Latihan Dengan Kebutuhan Lapangan PPL

Relevansi Materi Latihan	Pernyataan PPL Responden(%)
Relevan seluruhnya	0
Sebagian besar relevan	57
Sebagian kecil relevan	43

Lampiran 19. Manfaat Latihan Bagi PPL Di BPP Cisarua (1987)

Manfaat (tambahan)	Pernyataan PPL Responden (%)
Pengetahuan	100
Kecakapan	57
Keterampilan	29

Keterangan : *) Responden dapat menyatakan lebih dari satu

Lampiran 20. Jumlah Kelompok Tani Yang Berhasil Dikunjungi Oleh PPL Pada Setiap Periode Kunjungan (1987)

Jumlah Kelompok	Pernyataan PPL Responden (%)
1 - 4	29
5 - 9	71
10 lebih	-

Lampiran 21. Tanggapan PPL Tentang Supervisi (1987)

Tanggapan PPL	Pernyataan PPL Responden (%)
Senang	43
Biasa-biasa saja	57
Kurang Senang	0
Tidak Senang	0

Lampiran 22. Keadaan Tengguan Keluarga Responden
(1987)

U R A I A N	Pernyataan petani responden (%)			
	KT. Baru Tegal		KT. Paragejen	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Isteri	14	0.9	15	1.0
Anak	59	3.9	36	2.9
J U M L A H	75	4.8	51	3.9

@ Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.